

PERTARU

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Volume 1 No. 2, April 2025

TOPIK UTAMA

- Kesesuaian Rencana Pembangunan dalam Mendukung Perwujudan Infrastruktur Wilayah
- Tanah Kalurahan untuk kesejahteraan: Optimalisasi Pemanfaatan Lahan demi pembangunan berkelanjutan di DIY
- Menata Warisan Budaya: Penguatan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan Rekonstruksi Pojok Benteng dan Revitalisasi Alun - alun Utara Menuju Pengakuan UNESCO

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIY DALAM KONTEKS KEISTIMEWAAN

PROFIL WILAYAH

- Peta Rasa Jogsel (Jogja Selatan): Menelusuri Kuliner di SRS Kerto-Pleret dan Sekitarnya



DIALOG TOKOH
Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si.
(Paniradya Pati)

Sinergi Grand Design Keistimewaan
dalam Pengelolaan SRS dan Tata Ruang DIY



Scan QR CODE
untuk mengunduh
PERTARU versi Digital





SALAM BAHAGIA UNTUK PEMBACA PERTARU,

PERTAMA-TAMA, tentu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan ide dan pemikiran inspiratif kepada kita semua. Berkat rahmat-Nya, Edisi II Buletin PERTARU ini dapat terbit dengan mengangkat tema “Pembangunan Infrastruktur DIY dalam Konteks Keistimewaan”. Edisi ini merupakan bagian dari kolase tulisan edisi sebelumnya.

Dalam Edisi Kedua Buletin PERTARU ini, pembaca akan diajak untuk berkelana sekaligus menambah wawasan tentang keistimewaan tata ruang dan pertanahan di DIY. Edisi ini dimulai dengan rubrik *Dialog Tokoh* dan *Profil Wilayah* yang mengulas secara lebih mendalam tema utama. Dilanjutkan dengan rubrik-rubrik seperti *Topik Utama*, *Sekilas Info*, *Wacana*, *Liputan Kegiatan*, *Info dan Data*, *Potret Ruang*, *Pojok Ruang*, dan *Jurnal Terbaru*. Rubrik-rubrik tersebut menyajikan berbagai ide, baik yang sejalan dengan tema utama maupun di luar tema, tetapi tetap relevan dengan isu strategis tata ruang.

Sebagai pembuka, redaksi Buletin PERTARU menghadirkan *Dialog Tokoh* bersama Paniradya Pati DIY, Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si., yang mengulas implementasi *Grand Design Keistimewaan Urusan Tata Ruang*. Selain itu, juga ditampilkan perspektif dari kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan keistimewaan tata ruang dan pertanahan di DIY.

Sebagai bagian dari upaya memperingati Hari Warisan Dunia yang jatuh pada 18 April 2025, buletin ini juga mengulas tema “Menata Warisan Budaya: Penguatan Tata Ruang Kraton Yogyakarta melalui Rekonstruksi Pojok Beteng dan Revitalisasi Alun-Alun Utara Menuju Pengakuan UNESCO.”

Berbagai pembangunan infrastruktur di DIY menjadi bahasan utama, terutama yang berkaitan dengan keistimewaan daerah. Ulasan dimulai dari pembangunan Jalan Prambanan-Gading yang mendukung kemajuan infrastruktur daerah. Kemudian, disoroti pula pembangunan infrastruktur dari sudut pandang urusan pertanahan serta pemanfaatan tanah kalurahan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut tentu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, pembangunan harus tetap berpijak pada rambu-rambu yang ada. Di sinilah pentingnya kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagai pedoman untuk mendukung terwujudnya infrastruktur wilayah yang terencana.

Masih banyak tulisan menarik lainnya dalam edisi ini, yang dapat menjadi bahan renungan sekaligus gagasan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur DIY yang lebih baik ke depan.

Tim redaksi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Edisi II Buletin PERTARU ini. Semoga keberadaan buletin ini dapat memberikan inspirasi serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Selamat membaca dan menikmati.



05 | DIALOG TOKOH

Sinergi Grand Design
Keistimewaan dalam
Pengelolaan SRS dan Tata
Ruang DIY

[OLEH : ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.SI.]

08 | PROFIL WILAYAH

**Pemanfaatan Ruang
Kawasan Sempadan
Pantai DIY**

[OLEH : REDAKSI]

12 | TOPIK UTAMA

**Tanah Kalurahan
untuk Kesejahteraan:
Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan
Demi Pembangunan
Berkelanjutan
di DIY**

[OLEH : TOPAZ MARDIARTO, S.I.P., M.ACC*]

*KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMANFAATAN
PERTANAHAN DISPERTARU DIY

15 | TOPIK UTAMA

**Kesesuaian Rencana
Pembangunan dalam
Mendukung Perwujudan
Infrastruktur Wilayah**

[OLEH : EMY KUSPARYATI, S.E., M.SC., M.ENG.*]

*KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAPPERIDA DIY

19 | TOPIK UTAMA

**Menata Warisan Budaya:
Penguatan Tata Ruang
Kraton Yogyakarta
dengan Rekonstruksi
Pojoik Beteng dan
Revitalisasi Alun-Alun
Utara Menuju Pengakuan
UNESCO**

[OLEH : REDAKSI]



23 | SEKILAS INFO

**Ruang Publik Yogyakarta :
Di Tengah Kepadatan dan
Krisis Hijau**

[OLEH : IRUEKKAWA ELISA]

*PENULIS BUKU, CONTENT WRITER & CONTENT CREATOR

27 | WACANA

**Pembangunan Jalan
Prambanan – Gading Dalam
Mendukung Kemajuan
Infrastruktur Daerah**

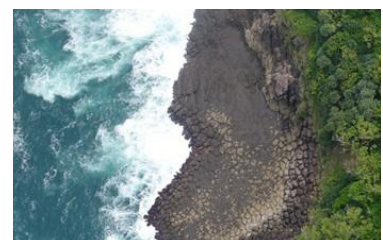
[OLEH : REDAKSI]

30 | WACANA

**Tanah Pusaka,
Pembangunan Bertumbuh:
Peran Keistimewaan
Pertanahan Dalam
Infrastruktur DIY**

[OLEH : ESTER RUFARIZA, S.T., M.A., M.URP.]

KASUBDIT PENGENDALIAN URUSAN PERTANAHAN PANIRADYA
KEISTIMEWAAN



34 | LAPORAN KEGIATAN

**Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Kalurahan Kawasan
Terpadu 2025**

[OLEH : REDAKSI]



38 | INFO & DATA

Peta Rasa Jogsel (Jogja Selatan) : Menelusuri Kuliner di SRS Kerto-Pleret dan Sekitarnya

[OLEH : REDAKSI]



44 | POTRET RUANG

Benteng Vredenburg

[FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY]

46 | POTRET RUANG

Pasar Sentul Yogyakarta : Simfoni Baru dalam Wajah

[FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY]

48 | POTRET RUANG

Lama Jalur Alternatif Penuh Pesona: Jembatan Tawang Ngalang di Kedung Kandang

[FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY]



49 | POJOK RUANG

Pembangunan Taman : Sebagai Solusi Polusi Udara di Yogyakarta Akibat Proyek Jalan Tol Jogja-YIA

[OLEH : ALFINA MIFTA NAFISAH]



54 | JURNAL

Nilai-Nilai Warisan Budaya : Dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

[OLEH : RIZKY ADI SUDRAJAD, S.PWK., MURBNCULHER]



BULETIN

PERTARU

[DEWAN REDAKSI]

PELINDUNG
Adi Bayu Kristanto

PENANGGUNG JAWAB
Wahyu Budi Nugroho

PEMIMPIN REDAKSI
Cahya Daru Saputro

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Titik Kurniawati

PENASIHAT REDAKSI
Arief Azazie Zain
Muhammad Dzulhanif Harahap
Caecilia Retno Kusharjanti
Moh. Qayyim Autad

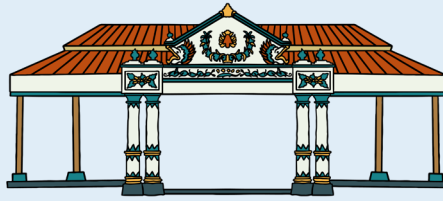
ANGGOTA REDAKSI
Dedin Jamaludin
Hanny Ulqia Queene A.
Astri Wulandari Rochmah
Lutfiah Dwi Utami
Zardhan Azhary Yusuf Ananto

@dispertaru.diy

dispertaru DIY

dispertaru@jogjaprovo.go.id

dispertaru.jogjaprovo.go.id



SINERGI *GRAND DESIGN* KEISTIMEWAAN DALAM PENGELOLAAN SRS DAN TATA RUANG DIY

[OLEH : ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.SI.]

DI BALIK julukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, tersimpan sebuah panduan besar yang menjadi kompas pembangunan yaitu *Grand Design Keistimewaan*. *Grand Design* bukan sekadar kumpulan strategi dan arah kebijakan, melainkan fondasi untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah kalurahan dalam menata ruang, mengelola tanah, dan membangun infrastruktur berbasis budaya

serta potensi lokal. Namun, sejauh mana *grand design* ini benar-benar menjelma dalam tindakan yang nyata? Dengan diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki mandat khusus dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya, tetapi juga mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks tersebut, peran kelembagaan Paniradya Kaistimewan menjadi krusial sebagai perumus, pelaksana, dan pengawas kebijakan keistimewaan. Pada wawancara ini, Buletin PERTARU berkesempatan untuk berdiskusi bersama Paniradya Pati Kaistimewan, Bapak Aris Eko Nugroho,

S.P., M.Si., guna mengkaji lebih dalam implementasi *Grand Design Keistimewaan*, prioritas anggaran, serta strategi pembangunan infrastruktur berbasis kekhasan Yogyakarta.

1. Bagaimana implementasi *grand design* keistimewaan urusan tata ruang dan urusan pertanahan saat ini?

Jawaban:

Aris Eko Nugroho: Ya, jadi *grand design* keistimewaan ini sebenarnya menjadi panduan utama bagi Pemerintah Daerah DIY, kabupaten/kota, sampai ke pemerintah kalurahan. Isinya cukup lengkap—mulai dari strategi, arah



PROFIL TOKOH

Nama : Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si.

Jabatan : Paniradya Pati Kaistimewan

Hobby : Kolektor hewan (Sulcata), tumbuhan (Anggrek, dll), dan motor antik (vespa)

kebijakan, sampai peta jalan yang memang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan, termasuk urusan tata ruang.

Contohnya, dalam pengembangan Satuan Ruang Strategis atau SRS—baik di Tanah Kasultanan maupun Kadipaten—kita sudah mulai menerapkan pola dan struktur ruang yang disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing. Di 18 SRS ini, masing-masing punya tujuan dan kebijakan yang menjadi dasar Paniradya dalam menyusun kebijakan agar pemanfaatan ruang benar-benar selaras dengan arah keistimewaan.

Kita juga punya tolok ukur atau indikator keberhasilan di bidang tata ruang. Misalnya, jumlah rencana yang sudah disusun, sejauh mana ruang sudah dimanfaatkan sesuai rencana, pengendaliannya, dan tentu saja pengawasannya di lapangan.

Kalau bicara soal program prioritas, beberapa yang bisa saya sebutkan antara lain revitalisasi kawasan Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner. Di sana ada kegiatan seperti penyediaan becak kayu tenaga alternatif dan bus listrik untuk mendukung zona emisi rendah, juga rencana Jogja Planning Gallery. Selain itu, ada juga pengembangan potensi lokal di berbagai SRS, seperti pariwisata dan budidaya cokelat di Nglanggeran, atau vanili dan kopi di Kulon Progo.

Kami juga mendorong konektivitas antarsatuan ruang strategis (SRS), misalnya lewat pembangunan Jalan Prambanan–Gading

dan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan. Terakhir, pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, maupun tanah kalurahan juga terus dioptimalkan lewat berbagai program berbasis potensi lokal.

2. Apa saja prioritas utama kebijakan anggaran dana keistimewaan dalam kegiatan tata ruang maupun kegiatan pertanahan?

Jawaban:

Aris Eko Nugroho: Kalau bicara soal prioritas anggaran, tentu kita berangkat dari dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada—seperti *Grand Design* Keistimewaan, RPJMD DIY 2022-2027, sampai strategi pengembangan wilayah di SRS Kasultanan dan Kadipaten.

Secara garis besar, prioritasnya ada dua. Pertama, pemanfaatan tanah-tanah strategis milik Kasultanan, Kadipaten, dan Kalurahan, sesuai potensi wilayahnya masing-masing. Kedua, kita fokus pada kegiatan yang bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat, terutama dalam hal mempercepat penanggulangan kemiskinan

3. Apa peran dana keistimewaan terhadap pembangunan infrastruktur DIY, apakah ada arahan atau rencana kedepan pada pengembangan infrastruktur?



Jawaban:

Aris Eko Nugroho: Peran dana keistimewaan dalam pembangunan infrastruktur bisa dibilang sangat signifikan, khususnya di infrastruktur dasar. Misalnya, di sektor transportasi, kita bangun jalan seperti Tawang-Ngalang, Prambanan–Gayamharjo, kemudian halte-halte bus bernuansa budaya,



[FOTO : TUGU YOGYAKARTA, REHAN MAJID (TIM PUBLIKASI)]

pengadaan becak kayu dan bus listrik, sampai APJ pintar yang juga punya nilai budaya.

Di bidang air bersih dan sanitasi, kita bangun sumur bor, sambungan rumah, hingga saluran limbah perkotaan. Untuk kesehatan, kita support Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam pembangunan dan pengadaan alat kesehatan. Bahkan di

bidang persampahan, kita bantu pembangunan TPS3R di kelurahan dan fasilitas pengolahan sampah termal di Banyuroto.

Ke depan, semua pengembangan ini tentu tetap mengacu pada strategi di dokumen seperti Grand Design, RPJMD, dan strategi pengembangan SRS. Kita juga susun skema pembangunan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

4. Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan paniradya terhadap kebijakan dana keistimewaan terutama urusan tata ruang dan pertanahan?

Jawaban:

Aris Eko Nugroho:

Pengawasan yang kami lakukan cukup komprehensif. Pertama, kami cek apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan indikator kinerja utama, renstra SKPD, dan target capaian fisik, keuangan, maupun *outcome*-nya.

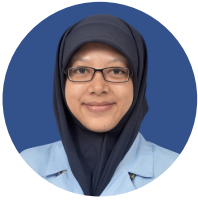
Semua ini dipantau lewat aplikasi KENES yang diisi dan diperbarui setiap bulan. Selain itu, Paniradya bersama DPTR DIY juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi bulanan untuk melihat progres kegiatan dan mencari solusi atas hambatan di lapangan. Kami juga memanfaatkan aplikasi spasial KASIL. Ini berguna untuk melihat sebaran kegiatan keistimewaan di SRS—jadi kita bisa menilai seberapa efektif dan

terhubung kegiatan tersebut antarwilayah. Dan tentu saja, kita juga memastikan semua kegiatan tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku, seperti RTRW, RDTR, maupun strategi pengembangan wilayah.

Grand Design

Keistimewaan DIY bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kompas pembangunan yang menentukan ke mana arah masa depan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Dengan pendekatan yang menyatukan tata ruang, pertanahan, infrastruktur, dan potensi lokal, konsep ini menjanjikan transformasi nyata jika dijalankan secara konsisten dan inklusif.

Wawancara ini menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar simbol budaya, melainkan juga kerangka kerja strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten, pengembangan Satuan Ruang Strategis (SRS), serta pengawasan berbasis data spasial, implementasi kebijakan keistimewaan menunjukkan upaya sistematis dalam membangun wilayah yang berdaya saing dan berpihak pada masyarakat. Semoga hasil diskusi ini dapat memperkaya wacana akademik serta mendorong penguatan praktik perencanaan wilayah yang adaptif dan kontekstual.



PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DIY

[OLEH : TITIK KURNIAWATI, S.T., M.URP¹]

SEMPADAN pantai merupakan wilayah transisi antara daratan dan lautan, kawasan ini menyimpan ekosistem yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti lahan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*seagrass beds*). Di lain sisi, peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan baik itu untuk pemukiman, perdagangan, pelabuhan, dan pariwisata yang relatif cepat di kawasan pesisir menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya menggerus keberadaan sempadan pantai. Masalah tersebut terlihat dengan adanya bangunan di sepanjang pesisir pantai selatan DIY yang melanggar batas sempadan pantai. Padahal, kawasan sempadan pantai termasuk dalam kategori kawasan lindung yang seharusnya dikontrol secara ketat pemanfaatan ruangnya.

• Penentuan Batas dan Lebar Sempadan Pantai

Tata cara penghitungan batas dan lebar sempadan

pantai diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. Batas sempadan pantai dihitung berdasarkan tingkat risiko bencana seperti bencana erosi/abrasi, banjir dari laut, gempa, tsunami, dan badai. Adapun lebar sempadan pantai, selain berdasarkan tingkat risiko bencana, lebar sempadan pantai juga dihitung berdasarkan 3 hal utama, yakni batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah darat, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

• Batas Sempadan Pantai DIY

DIY memiliki panjang pantai 135,64 km dengan pembagian di Kabupaten Gunungkidul sepanjang 94,33 km, Kabupaten Bantul sepanjang 15,22 km, dan Kabupaten Kulon Progo sepanjang 26,09 km. Penentuan batas sempadan pantai berdasarkan kajian yang telah dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada tahun 2023 telah dituangkan dalam RTRW DIY tahun 2023-2043 dengan lebar 100 meter, 150 meter, 200 meter, dan 300 meter.

No.	Analisis Sainifik Jarak Sempadan Pantai	Tipologi pantai
1	100 meter	Pada pantai bertebing tinggi berbatuan limestone dan atau beku
2	150 meter	- Berteluk Landai Berpasir - Berteluk Berteras Berpulau - Berteluk Bertebing
3	200 meter	- Pantai landai berpasir - Pantai landai berteluk berpasir - Pantai berteluk berbatu - Pantai landai berteras
4	300 meter Alasan saintifik sejarah tsunami di selatan pulau Jawa dan risiko gempa dari jalur subduction lempeng tektonik	- Pantai landai berteras - Pantai landai berlembah - Pantai landai berpasir berpulau - Pantai landai berpasir berlaguna

1 (Penata Ruang Muda pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY)

Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah pantai yang paling banyak, didominasi dengan batas sempadan pantai 100 meter yaitu sebanyak 48 pantai. Selain itu terdapat 18 pantai dengan lebar sempadan pantai 150 meter diantaranya Pantai Ngrehenan, Pantai Drini, Pantai Baron, Pantai Siung, Pantai Krakal, Pantai Pantai Pulang Syawal, dan Pantai Sadranan. Terdapat pula 18 pantai dengan lebar sempadan pantai 200 meter, yaitu diantaranya Pantai Sepanjang, Pantai Kukup, Pantai Pok Tunggal, dan Pantai Sadeng.

Adapun pantai di Kabupaten Bantul, didominasi dengan sempadan pantai 200 meter, kecuali pada Pantai Pandansimo, Pantai Samas, dan Pantai Baros yang memiliki batas sempadan pantai 300 meter. Hampir sama dengan Kabupaten Bantul, sebagian besar pantai di Kabupaten Kulon Progo memiliki batas sempadan 200 meter. Terdapat dua pantai dengan batas sempadan pantai 300 meter yaitu Pantai Glagah dan Pantai Trisik.

• Pemanfaatan Ruang Eksisting Kawasan Sempadan Pantai

Sebagian lahan di wilayah Pantai Selatan DIY telah dimanfaatkan secara intensif dan telah ditetapkan untuk berbagai rencana kegiatan berskala regional bahkan berpotensi internasional.

Kawasan ini menjadi penting dan strategis, karena memiliki karakter kuat sebagai konsekuensi atas keberadaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) pantai, jaringan jalan Pantai Selatan (Pansela), bandara internasional, potensi tambang, hingga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).



SEMPADAN PANTAI TRISIK YANG TELAH BANYAK DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN, PERTANIAN, DAN BUDIDAYA TAMBAK



Batas Sempadan Pantai (meter)



Informasi Zona





SEMPADAN PANTAI PARANGTRITIS
YANG TELAH DIDOMINASI DENGAN BANGUNAN



SEMPADAN PANTAI PANDANSIMO YANG DIDOMINASI
DENGAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG

• Pergub Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai

Pemanfaatan ruang sempadan pantai di DIY telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 tahun 2025 tentang Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai. Pergub ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW DIY. Selain itu Pergub ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai DIY.

Kawasan sempadan pantai di DIY dibagi ke

dalam dua zona yaitu zona primer dan zona sekunder. Zona primer merupakan sebagian ruang kawasan sempadan pantai yang berbatasan dengan bibir pesisir yang berfungsi untuk kegiatan perlindungan/ pengamanan pantai dan akses umum. Zona primer dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat sampai dengan batas 50% dari lebar sempadan pantai. Adapun zona sekunder merupakan sebagian ruang kawasan sempadan pantai yang meliputi area yang berbatasan dengan area primer sampai dengan batas garis sempadan pantai ke arah darat.

Terdapat tiga hal penting yang diatur dalam

Pergub ini yaitu pengaturan terhadap kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada masing-masing zona.

Baik zona primer maupun sekunder kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan yang bersifat alamiah (pelestarian alam dan perikanan) serta kegiatan perlindungan baik itu perlindungan terhadap bencana alam maupun perlindungan kedaulatan negara (hankam).

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya yang selaras dengan tujuan perlindungan sempadan pantai dengan

	Zona Primer	Zona Sekunder
Kegiatan Diperbolehkan	a. pelestarian alam; b. sistem mitigasi bencana; c. pertahanan dan keamanan; dan d. penangkapan hasil laut.	a. pelestarian alam; b. sistem mitigasi bencana; c. pertahanan dan keamanan; dan d. pangkalan pendaratan ikan.
Diperbolehkan Dengan Syarat	a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai; b. ruang terbuka hijau; c. cagar budaya; d. perkebunan rakyat dan hutan produksi; e. pelabuhan perikanan; f. pelabuhan; g. pendidikan dan penelitian; h. pariwisata dan olahraga; i. kegiatan sosial budaya setempat; j. pertanian; k. kegiatan pergaraman; l. pengembangan energi terbarukan; dan m. akses umum Kawasan.	a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai; b. ruang terbuka hijau; c. cagar budaya; d. perkebunan rakyat dan hutan produksi; e. pelabuhan perikanan; f. pelabuhan; g. pendidikan dan penelitian; h. pariwisata dan olahraga; i. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat; j. pertanian; k. kegiatan pergaraman; l. pengembangan energi terbarukan; m. pembuatan jalan; n. tempat pelelangan ikan; dan o. fasilitas pendukung pariwisata.
Tidak Diperbolehkan	a. penutupan akses terhadap pantai; b. penambangan; c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis; d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai; dan bangunan baru.	a. penutupan akses terhadap pantai; b. penambangan; c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis; d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai; dan e. bangunan yang berisiko merusak ekosistem pantai.

syarat tidak merusak ekosistem pantai, tidak menyebabkan kerusakan alam seperti erosi, abrasi, penurunan tanah, dan banjir, serta tidak menimbulkan limbah yang besar.

Terdapat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yang hanya terdapat

pada zona sekunder yaitu kegiatan pembuatan jalan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pendukung pariwisata. Pembuatan jalan yang dimaksud disini berupa penanda batas Kawasan Sempadan Pantai dengan memberikan akses berupa jalan. Adapun fasilitas

pendukung pariwisata merupakan fasilitas yang ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan antara lain tempat parkir, *jogging track*, toilet, gazebo, pujasera serta kios oleh-oleh dan cenderamata.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan baik itu pada zona primer maupun sekunder di kawasan sempadan DIY adalah penutupan akses terhadap pantai, penambangan, bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis, serta kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan karena mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai diantaranya adalah budidaya tambak, peternakan, serta kegiatan pengambilan air tanah yang berlebihan. Khusus pada zona primer tidak diperbolehkan adanya bangunan baru, adapun pada zona sekunder masih diperbolehkan terdapat bangunan selama tidak berisiko merusak ekosistem pantai.

Sumber :

- Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai DIY, DPTR DIY, 2023
- Peraturan Gubernur DIY No.8 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai



Tanah Kalurahan untuk Kesejahteraan: Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Demi Pembangunan Berkelanjutan di DIY

[OLEH: TOPAZ MARDIARTO, S.I.P., M.ACC ¹]

SIAPA yang menyangka, lahan-lahan Kalurahan di DIY memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024, tanah Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kasultanan dan Kadipaten, yang pemanfaatannya harus ditujukan untuk perkembangan budaya, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tiga misi ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam merencanakan penggunaan lahannya.

Dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017, Pengembangan budaya dipahami sebagai upaya untuk membangun, meningkatkan, mengelola, dan menjaga sistem nilai budaya Yogyakarta yang

sudah ada. Sementara itu, kepentingan sosial diartikan sebagai kebutuhan bersama yang diusahakan untuk meraih tujuan kolektif masyarakat. Lalu kesejahteraan masyarakat berarti terwujudnya kehidupan yang seimbang, baik dari aspek sosial, material, maupun spiritual.

Sepanjang perjalanannya hingga tahun 2025, penggunaan tanah Kalurahan telah menghasilkan berbagai pembangunan. Pada bidang kebudayaan, tanah Kalurahan dimanfaatkan untuk mendirikan gedung kesenian, embung, institusi pendidikan, serta kantor pemerintah. Untuk kepentingan sosial, pemanfaatan tanah Kalurahan untuk gedung PAUD, tempat ibadah, fasilitas olahraga, akses bandara, dan lumbung mataraman. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, lahan



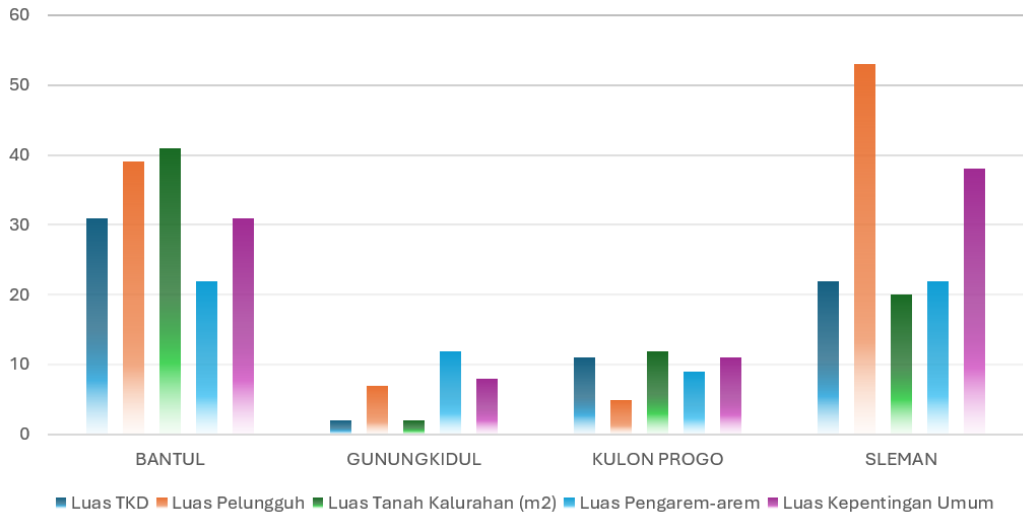
Dengan Optimalisasi Tanah Kalurahan, Tidak Hanya Membangun Infrastruktur Fisik, Tetapi Juga Memperkuat Nilai Budaya, Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.”

- C. Retno Kusharjanti,
Kepala Bidang Pemanfaatan,
Penanganan, Permasalahan, dan
Pengawasan Pertanahan.

Kalurahan dimanfaatkan untuk mendirikan pasar desa, balai pendidikan, rumah sakit, puskesmas pembantu, pertokoan, serta kios UMKM dsb.

1 Kepala Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan Dispertaru DIY

REKAPITULASI DATA TANAH KALURAHAN



[GRAFIK REKAP. IZIN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN, DPTR, 2025]

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini mengambil langkah progresif dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan, upaya ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung dengan memanfaatkan potensi tanah Kalurahan yang selama ini belum tergarap optimal.

Program BKK bukan sekadar bantuan dana. Lebih dari itu, program ini menjadi alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Pemerintah Daerah DIY melihat bahwa lahan-lahan milik Kalurahan, terutama yang berasal dari hak anggaduh Kasultanan dan Kadipaten, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga perdagangan lokal.

Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, tercatat ada 131 bidang tanah Kalurahan di wilayah DIY yang telah mendapat izin penggunaan. Kabupaten Sleman menjadi yang paling aktif dengan 60 bidang tanah yang sudah dimanfaatkan. Disusul oleh Gunungkidul dengan 44 bidang, Kulon Progo dengan 18 bidang, dan Kabupaten Bantul dengan 9 bidang. Secara keseluruhan, luas lahan yang telah digunakan mencapai kurang lebih 253.083 meter persegi. Data ini mencerminkan bahwa semangat untuk menggerakkan roda ekonomi desa melalui tanah Kalurahan tersebar secara merata di empat kabupaten tersebut.

Program BKK ini menyasar Kalurahan-kalurahan yang tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga melibatkan masyarakat

yang tergolong kurang mampu. Harapannya, mereka bisa mendapatkan akses langsung terhadap lahan dan peluang ekonomi yang ada, sehingga kesenjangan sosial pun dapat ditekan secara perlahan namun pasti.

Namun, pemanfaatan lahan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah Kalurahan harus menunjukkan komitmen kuat dalam hal tertib administrasi pertanahan. Artinya, semua proses harus melalui jalur resmi, terdata dengan baik, dan dikelola secara transparan.

Keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai terlihat jelas, salah satunya di Kabupaten Sleman. Berbagai Kalurahan menunjukkan terobosan yang bukan hanya inovatif, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.



[FOTO : INTEGRASI PERTANIAN DI CATURHARJO, ARDIAN]

Di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, pengembangan sistem pertanian terintegrasi (*integrated farming*) menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan lahan secara terpadu mampu mengangkat perekonomian warga. Melalui kolaborasi antara sektor pertanian, peternakan kambing, ikan, dan pengolahan hasil, kini masyarakat memiliki lebih banyak sumber penghasilan dalam satu ekosistem usaha.

Sementara itu, Kalurahan Merdikorejo di Kapanewon Tempel sukses memanfaatkan teknologi modern melalui budidaya melon dengan sistem rumah kaca.

Teknik ini memungkinkan pengendalian iklim mikro yang optimal, sehingga kualitas dan kuantitas panen melon pun meningkat pesat. Tak kalah menarik, Kalurahan Pondokrejo, Glagaharjo, dan Bangunkerto menunjukkan keberhasilan di bidang peternakan. Ketiga Kalurahan ini memperkenalkan konsep peternakan domba modern dengan pendekatan teknologi

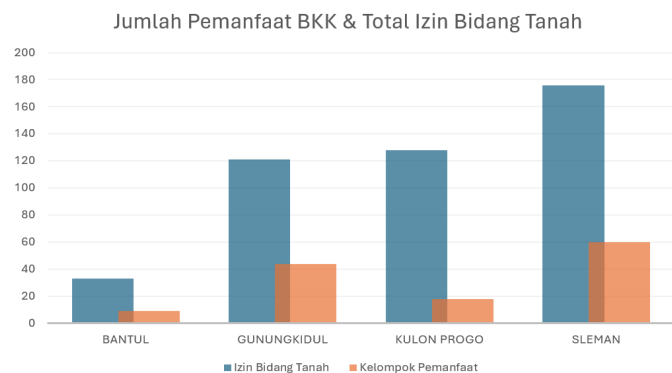
dan manajemen terkini. Yang istimewa, kegiatan ini melibatkan petani milenial, menciptakan peluang dan semangat baru bagi anak-anak muda di desa untuk terjun ke sektor pertanian dan peternakan dengan cara yang lebih profesional.

Meski penggunaan tanah Kalurahan ini sangat adaptif, terdapat batasan ketat yang perlu dipatuhi. Tanah Kalurahan tidak boleh dipergunakan untuk mendirikan rumah pribadi, villa, homestay, guest house, hotel, ruko, atau jenis lain yang berfokus pada kepentingan komersial pribadi. Bangunan bawah

tanah atau basement dapat dibangun hanya jika memiliki fungsi sebagai struktur atau utilitas umum. Tentu saja, aktivitas penambangan di tanah Kalurahan adalah larangan tegas yang tidak bisa dinegosiasikan.

Agar semua pemanfaatan terlaksana sesuai peraturan, Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Daerah DIY melalui dinas yang bersangkutan secara proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan. Semua hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan luhur pemanfaatan tanah Kalurahan tetap tercapai, bukan hanya menjadi proyek yang tidak berarah.

Tanah Kalurahan di DIY bukan hanya sekadar area yang kosong. Tetapi merupakan sumber daya berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan derajat dan kesejahteraan. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pengawasan yang ketat, kami yakin bahwa lahan-lahan ini akan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat. (zdn)



[GRAFIK TOTAL IZIN BIDANG TANAH KALURAHAN DIBANDING JUMLAH PEMANFAAT BKK, DPTR, 2025]



Kesesuaian Rencana Pembangunan dalam Mendukung Perwujudan Infrastruktur Wilayah

[OLEH : EMY KUSPARYATI, S.E., M.SC., M.ENG.¹]

RENCANA perkembangan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD DIY 2022-2027 dan RPJPD DIY 2025-2045 memuat berbagai proyek strategis yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah. Dalam RPJMD DIY, rencana pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, penambahan lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo (Yogyakarta International Airport), pengembangan akses kereta api menuju bandar udara baru tersebut, pembangunan jalur ganda kereta api (*double track*) di jalur selatan Pulau Jawa, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro yang melayani Kabupaten

Bantul dan Kulon Progo. Sementara itu dalam RPJPD DIY 2025-2045, perencanaan pembangunan infrastruktur diperluas dengan mencakup pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di wilayah DIY yang meliputi ruas Bawen-Magelang-Yogyakarta dan Kartasura-Klaten-Yogyakarta. Selain itu, direncanakan pula pembangunan dan optimalisasi sistem transportasi publik massal berbasis rel dan jalan, penyediaan transportasi ramah lingkungan (*green transportation*), pengembangan sistem *expressway* serta jaringan perkeretaapian lintas Jawa, dan pembangunan lintas atas maupun bawah di beberapa simpul kemacetan pada jalan-jalan arteri di wilayah Yogyakarta.

Melihat pada visi dan misi Bapak Gubernur DIY (Sri Sultan Hamengkubuwono X), arah pembangunan akan



[SALAH SATU PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PRAMBANAN - GAYAMHARJO, 2025]
[FOTO : IRUEKKAWA ELISA]

difokuskan pada Kawasan Selatan sesuai dengan visi beliau “*Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*”. Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan dikarenakan kawasan ini mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi

1 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapperida DIY

dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Yogyakarta dan Sleman.

Berdasarkan RPJPD DIY Tahun 2025-2045, pembangunan di Kawasan Selatan difokuskan pada prioritas peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, seperti air minum, sanitasi, energi/listrik, serta konektivitas antar wilayah, yang dilakukan berlandaskan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sedangkan menurut RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027, pembangunan kawasan selatan diarahkan melalui pengembangan infrastruktur,

pertumbuhan pusat ekonomi baru, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan *Smart Kalurahan* dan penguatan transformasi spasial. Sementara itu, menurut RTRW DIY Tahun 2019-2039, pembangunan infrastruktur di kawasan selatan difokuskan pada pengembangan akses transportasi publik, pengelolaan persampahan, jaringan pengelolaan limbah, serta infrastruktur pertanian dan perlindungan lahan pangan. Pemerintah Daerah DIY juga memperkuat kolaborasi multisektor untuk mendukung

percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

• **Kesesuaian antara Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pemerataan Pembangunan**

Penyusunan RPJMD sudah seharusnya mengacu pada RTRW. Sehingga, secara umum rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah saling berhubungan dan selaras satu sama lain.

[TABEL 1 MATRIKS PERSAMAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH]

Aspek/ Komponen	RPJMD 2022-2027	RPJPD 2025-2045	RTRW DIY 2023-2043	Keselarsan
Visi Daerah	"Mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya berbasis nilai keistimewaan dan teknologi"	"Mewujudkan Yogyakarta Istimewa yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Global"	Mendorong tata ruang berbasis pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan daya saing wilayah	Visi pembangunan dan visi ruang saling mendukung nilai keistimewaan dan keberlanjutan
Tujuan Pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup, daya saing ekonomi, tata kelola pemerintahan	Peningkatan daya saing global, inovasi, kesejahteraan berkelanjutan	Struktur ruang berbasis pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis	Tujuan pembangunan diarahkan untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan
Strategi pengembangan wilayah	Fokus pertumbuhan wilayah, keseimbangan kota-desa	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Kota Yogyakarta	Pusat kegiatan wilayah (PKW), lokal (PKL), dan Nasional (PKN)	Strategi pembangunan memperkuat arahan struktur ruang
Isu strategis	Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata budaya	Inovasi teknologi, ketahanan pangan, energi baru-terbarukan	Perlindungan zona hijau, pengembangan transportasi publik, kawasan agropolitan	Prioritas program pembangunan mendukung arahan pemanfaatan ruang
Kawasan Strategis	Pengembangan kawasan pariwisata budaya, sentra pendidikan	Pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan budaya	Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Nasional (KSN)	Penentuan kawasan strategis disesuaikan antar dokumen

[SUMBER: RPJMD DIY 2022-2027, RPJPD DIY 2025-2045, DAN RTRW 2023-2043]

[TABEL 2. TABEL INDEKS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR TAHUN 2017 - 2023]

No.	Indikator	Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (%)	88,91	91,30	96,62	96,46	96,18	96,45	97,69
2.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	85,27	91,77	91,30	92,82	92,92	94,77	95,49
3.	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau (%)	94,15	95,79	96,66	97,26	97,75	98,12	96,12
Nilai Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar (%)		89,44	92,95	94,86	95,51	95,61	96,44	96,43

[SUMBER : DINAS PUPESDM DIY, 2023 (DIOLAH)]

Komponen RTRW terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau jaringan prasarana diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan. Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Secara garis besar dalam pelaksanaannya rencana pembangunan harus mengikuti arahan - arahan dalam rencana tata ruang wilayah dengan tujuan, potensi, dan pengaturan yang ada didalamnya, untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis spasial dan merata.

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di DIY rencana pengembangan

infrastruktur yang paling berpengaruh yaitu peningkatan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas, dimana peningkatan tersebut mencakup penyediaan air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni, energi/ listrik, serta pembangunan sistem transportasi publik massal berbasis rel dan jalan terintegrasi antar kawasan. Pengembangan infrastruktur tersebut akan menjadi pondasi atas tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial terutama di kawasan yang selama ini kurang berkembang, seperti wilayah selatan DIY. Dengan adanya ketersediaan air bersih, listrik, jalan, dan transportasi massal tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka akses terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta menarik investasi baru. Dengan demikian, hal tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata di DIY.

• Wajah DIY di Masa Yang Akan Datang

Dengan adanya rencana *refocusing* anggaran nasional untuk program prioritas seperti MBG, tantangan yang terjadi terhadap kelangsungan pembangunan infrastruktur mungkin dapat terjadi. Secara umum, arah pembangunan infrastruktur DIY dapat dikatakan selaras dengan prinsip *refocusing* pemerintah, karena keduanya menekankan pada pembangunan berdasarkan *outcome based*, serta pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut mengharuskan pembangunan infrastruktur DIY akan lebih selektif dengan fokus pada kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup. Dilihat berdasarkan ketercapaian pembangunan infrastruktur di DIY, telah menunjukkan kemajuan signifikan yang fokus pada pemerataan akses pelayanan dasar, dimana pembangunan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi



[PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENGHUBUNGKAN PRAMBANAN -
GAYAMHARJO, 2025]
[FOTO : IRUEKKAWA ELISA]

wilayah, mengurangi ketimpangan antar kawasan, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekologi. Dalam RPJPD, dicantumkan bahwa pengelolaan pembangunan tetap harus memperhatikan efisiensi, efektivitas berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pengembangan infrastruktur yang strategis dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi tetap diprioritaskan.

Dalam 20 tahun kedepan, perkembangan infrastruktur DIY akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berkelanjutan hal tersebut tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045. Strategi pembangunan ini akan melalui empat tahapan besar, yaitu fondasi pembangunan (2025-2029), akselerasi pembangunan (2030-2034), ekspansi pembangunan (2035-2039), dan perwujudan visi (2040-2045). Upaya yang dilakukan dalam strategi tersebut meliputi peningkatan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, energi/listrik, serta pengembangan infrastruktur

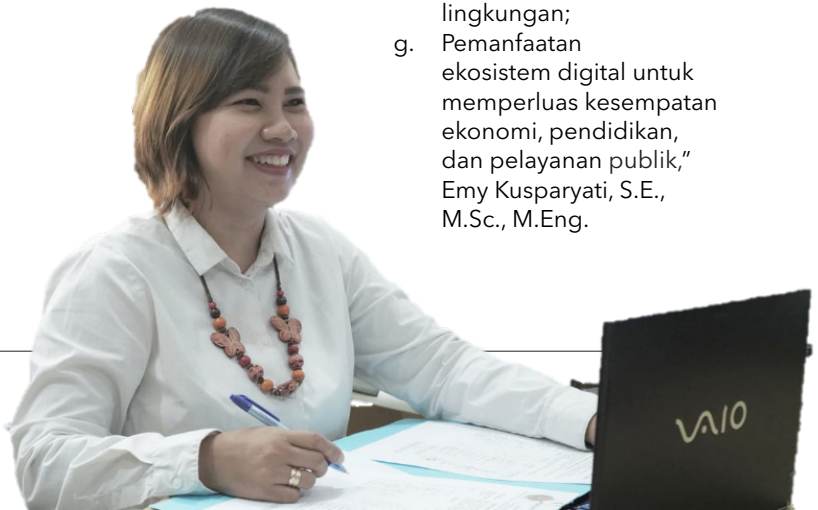
konektivitas transportasi yang terintegrasi antar kawasan. Selain itu, dilakukan pula pembangunan sistem transportasi publik massal rendah emisi, penyediaan *green transportation*, pengembangan jaringan *expressway* dan perkeretaapian lintas jawa, serta optimalisasi jalan tol Trans Jawa di wilayah DIY. Infrastruktur energi juga diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi melalui pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan *smart grid*, juga dalam penguatan infrastruktur perkotaan untuk membentuk kawasan perkotaan yang inklusif, berketahanan, dan berstandar global di kawasan perkotaan Yogyakarta (RPJPD DIY 2025 - 2045).

Sesuai dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, wilayah DIY terkenal dengan keunggulannya dalam sektor pariwisata, pendidikan, dan budaya. Dalam mewujudkan sektor unggulan tersebut pembangunan infrastruktur turut berperan dalam menunjang 3 aspek tersebut yaitu dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui infrastruktur jalan, transportasi umum, bandara, dan jaringan

telekomunikasi maupun energi; pengembangan kawasan strategis pariwisata dan budaya, seperti perbaikan fasilitas umum, ruang terbuka publik, dan pelestarian cagar budaya; peningkatan infrastruktur pendidikan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, laboratorium riset, serta literasi digital lainnya; mendorong infrastruktur digitasi dan inovasi untuk memperkuat sektor pendidikan dan budaya di era digital; penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi kreatif; serta infrastruktur layanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat.

"Langkah yang harus diambil untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yaitu :

- Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - Penguatan transformasi sosial dan ekonomi;
 - Afirmasi di sektor pendidikan dan Kesehatan;
 - Transformasi ekonomi berbasis budaya dan inovasi lokal;
 - Penguatan konektivitas antar wilayah;
 - Peningkatan ketahanan lingkungan;
 - Pemanfaatan ekosistem digital untuk memperluas kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,"
- Emy Kuspariyati, S.E., M.Sc., M.Eng.





MENATA WARISAN BUDAYA :

Penguatan Tata Ruang Kraton Yogyakarta dengan Rekonstruksi Pojok Beteng dan Revitalisasi Alun-Alun Utara Menuju Pengakuan UNESCO

[OLEH : REDAKSI]

DAERAH Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya daerah provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan sistem pemerintahan monarki dalam bentuk Kraton. Lebih dari sekadar pusat pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta, Kraton juga menjadi simbol sejarah dan pusat kebudayaan Jawa yang kaya. Tidak hanya berfungsi sebagai kediaman Sultan atau istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta, kawasan Kraton Yogyakarta juga berperan penting dalam pusat pelestarian budaya, menjadi tempat berlangsungnya berbagai tradisi, seni, dan adat istiadat yang telah diwariskan

secara turun-temurun. Ditetapkannya SK Gubernur Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Keraton sebagai cagar budaya di Yogyakarta menjadi bukti nyata pelestarian warisan sejarah.

Perancangan dan Tata Ruang Kraton Yogyakarta

Kraton Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Rancangan desain dasar

tata ruang dan lanskap dari Kraton disusun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan mendasarkan pembangunan Keraton pada prinsip *Hamemayu Hayuning Bawono*, yang mengandung makna menjaga dan memperindah alam agar tetap sejahtera dan lestari. Sementara itu, konsep yang digunakan dalam merancang tata ruang Kraton Yogyakarta ialah kesatuan konsep-konsep kosmologi Jawa yang menggambarkan hubungan keselarasan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Tiap elemen tersebut dalam tata ruangnya mengandung filosofi mendalam yang mencerminkan harmoni

antara alam semesta (makrokosmos) dan kehidupan manusia (mikrokosmos).

Sumbu Filosofi

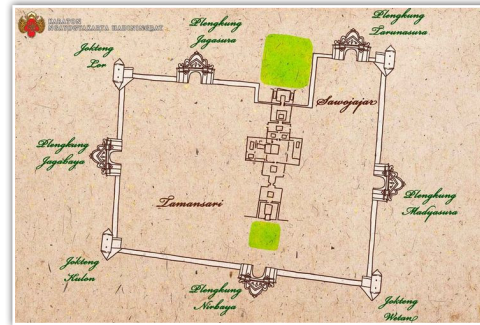
Dalam perancangannya, salah satu konsep utama yang menjadi dasar tata ruang Keraton Yogyakarta ialah Sumbu Filosofi, sebuah garis imajiner yang membentang dan menghubungkan Gunung Merapi, Laut Selatan, dan Keraton sebagai titik pusatnya. Sumbu Filosofi Yogyakarta pada 18 September 2023 secara resmi telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO dan dikenal sebagai *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Di sepanjang sumbu ini, terdapat bangunan-bangunan penting lainnya seperti Panggung Krapyak, Cepuri Kraton, dan Tugu Pal Putih yang masing-masing memiliki filosofi mendalam karena

menggambarkan perjalanan siklus hidup manusia dari mulai lahir hingga menghadap Sang Pencipta.

Bagian Tata Ruangnya

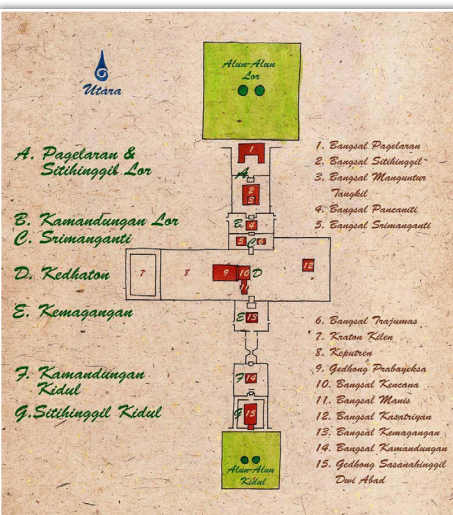
Selain menjadi bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, Kraton Yogyakarta sendiri memiliki tatanan ruang yang sarat akan makna dan nilai filosofis. Kawasan kompleks Kraton terbagi dalam tiga bagian utama, di antaranya kompleks depan, kompleks inti, dan kompleks belakang Kraton. Gerbang utama, Alun-alun Lor, dan Masjid Gedhe membentuk kompleks depan Keraton. Kompleks inti terdiri atas tujuh rangkaian plataran, di antaranya Pagelaran dan Siti Hinggil Lor, Kamandungan Lor, Srimanganti, Kedhaton, Kemagangan, Kamandungan Kidul, dan Siti Hinggil Kidul. Sementara itu, kompleks belakang Keraton meliputi Alun-alun Kidul dan Plengkung Nirbaya.

tembok terdapat bangunan yang disebut Pojok Beteng atau "Jokteng". Benteng yang mengelilingi Keraton ini pada awalnya mempunyai empat pojok utama, yaitu Pojok Beteng Kidul Kulon (tenggara), Pojok Beteng Kidul Kulon (barat daya), Pojok Beteng Lor Kulon (barat laut) dan Pojok Beteng Lor Wetan (timur laut).



[GAMBAR 2 | REKONSTRUKSI POJOK BETENG KRATON YOGYAKARTA]
[SUMBER: [HTTPS://WWW.KRATONJOGJA.ID/TATA-RAKITING/5-BENTENG-KERATON-YOGYAKARTA/](https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/5-BENTENG-KERATON-YOGYAKARTA/)]

Namun, pernah ada masa dimana hanya tersisa tiga bangunan Pojok Beteng. Pojok Beteng Lor Wetan (timur laut) adalah Pojok Beteng yang sempat hilang dan berubah menjadi jajaran permukiman penduduk. Beberapa peristiwa yang menyebabkan hilangnya Jokteng tersebut secara berangsur diantaranya peristiwa Geger Sepehi, bencana alam gempa bumi, dan masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Kejadian awal yang membuat bastion/menara pandang yang menjadi bagian dari Pojok Beteng Lor Wetan hancur adalah penyerbuan Kraton Yogyakarta yang dilakukan tentara Inggris pada tahun 1812 yang dimaksud dengan peristiwa Geger Sepehi. Kemudian,



[GAMBAR 1 | PETA TATA RUANG YOGYAKARTA]
[SUMBER: [HTTPS://WWW.KRATONJOGJA.ID/TATA-RAKITING/4-TATA-RUANG-DAN-BANGUNAN-KAWASAN-INTI-KERATON-YOGYAKARTA/](https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/4-TATA-RUANG-DAN-BANGUNAN-KAWASAN-INTI-KERATON-YOGYAKARTA/)]

Rekonstruksi Pojok Beteng Kraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta memiliki tembok yang mengelilingi kawasannya sebagai elemen vital dalam struktur pertahanan. Tembok ini dibangun pada akhir abad ke-18 atas instruksi dari Sri Sultan HB I dan saat ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan beteng. Fungsi Benteng sebagai pelindung terhadap ancaman dari luar sekaligus juga menjadi lambang kekuasaan dan kedaulatan Kasultanan Ngayogyakarta. Di setiap ujung pertemuan antar

pada tahun 1867 terjadi bencana gempa bumi yang banyak merusak rumah para abdi dalem hingga mereka kehilangan tempat tinggalnya. Guna menyikapi peristiwa yang terjadi, Sri Sultan HB VI mengizinkan abdi dalem untuk mendirikan rumah di area terbuka di sekitar Pojok Beteng. Kemudian, pada masa penduduk Jepang, warga Yogyakarta dilanda ketakutan akibat tindakan tentara Jepang yang dianggap kejam. Mereka pun meminta perlindungan kepada Hamengkubuwana IX agar dibangun pemukiman bagi penduduk di bagian dalam beteng.

Program Rekonstruksi Beteng Kraton

Tahun 2020 Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan Keraton Yogyakarta

sepakat untuk membangun kembali Pojok Beteng Lor Wetan yang sudah hancur tersebut. Sebelum dilakukan proses pembangunan, telah dilakukan pemugaran dengan pembebasan lahan dan bangunan di area bekas pojok beteng tersebut karena telah berubah menjadi pemukiman penduduk. Tercatat ada 30 bidang tanah dan bangunan yang terdampak revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan ini. Jadi, arah dan tujuan dari rekonstruksi yang dilakukan adalah untuk pelestarian sejarah masa lalu.

Revitalisasi Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta

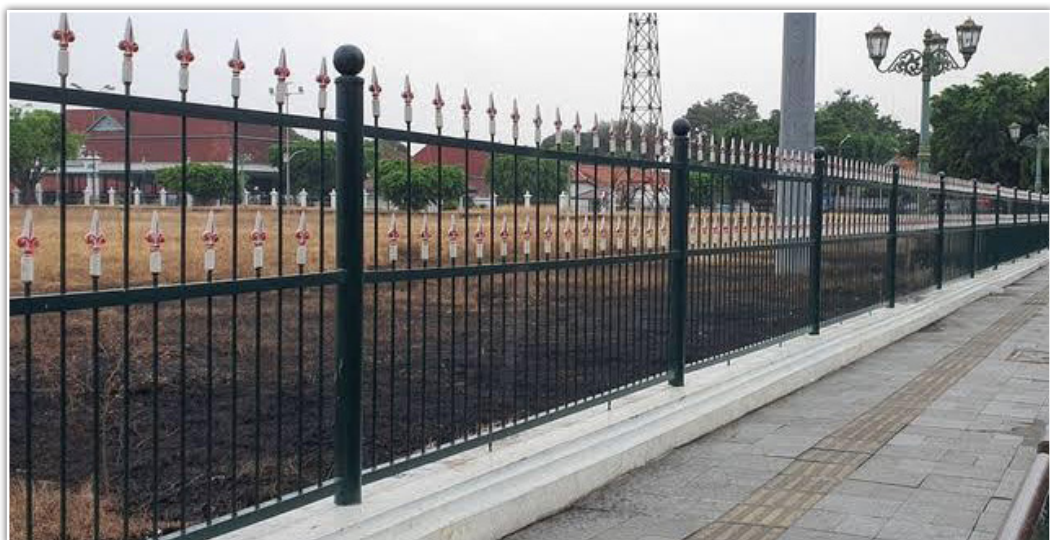
- Pengenalan alun alun: fungsinya untuk apa

Alun-alun utara atau yang lebih biasa dikenal dengan sebutan alun-alun lor adalah sebuah hamparan tanah

lapang atau ruang terbuka yang juga menjadi satu diantara beberapa landmark Kraton Yogyakarta yang ada. Letak alun-alun ini berada di sisi depan (sebelah utara) dari Keraton dan posisinya juga berada pada sumbu filosofis yang apabila ditarik garis lurus akan sejajar dengan Tugu Golong Gilig sampai Panggung Krapyak. Dulunya alun-alun ini digunakan untuk berbagai kegiatan kerajaan, seperti upacara adat, tempat berlatih prajurit, sampai tempat berinteraksi antara rakyat dengan Sultan. Namun, seiring berkembangnya zaman, fungsi alun-alun kian beragam dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan komersial yang tidak selalu sesuai dengan nilai historisnya. Guna menjaga kelestarian dan ketertiban kawasan ini, Pemerintah Daerah (Pemda)



GAMBAR. 3 | BETENG POJOK LOR WETAN YANG SUDAH DIREVITALISASI
[SUMBER : <https://idpda.com/keutuhan-fisik-benteng-baluwerti-kraton-jogja-akmi-dikembalikan/>]



[GAMBAR 4 | PEMASANGAN PAGAR DI SEKELILING ALUN-ALUN]
[SUMBER : [HTTPS://BLUE.KUMPARAN.COM/](https://blue.kumparan.com/)]

DIY bersama dengan pihak Keraton menggagas program revitalisasi Alun-Alun Utara dengan melakukan pemagaran dan melakukan penggantian pasir.

a. Pemagaran

Program pemagaran ini bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang, melindungi nilai sejarah alun-alun dari aktivitas yang dapat merusak, dan pada hakikatnya dilakukan untuk mengembalikan kondisi alun-alun seperti pada masa Sultan HB I (Kompas.id). Bentuk perubahan yang dilakukan yaitu dengan memasang pagar di sekeliling alun-alun.

b. Penggantian pasir

Setelah pemasangan pagar pada tahun 2020, Kraton Yogyakarta melanjutkan upaya revitalisasi Alun-Alun Utara pada tahun 2022 dengan mengganti permukaannya yang awalnya rumput menjadi menggunakan pasir. Dikutip dari jogjapolitan.harianjogja.com, pasir yang menutupi

Alun-Alun Utara mempunyai makna yang mendalam sebagai simbol laut tak berpantai, mencerminkan kemah ketakhinggaan Tuhan. Namun, seiring waktu, kondisi pasir semakin menurun akibat berbagai aktivitas yang menyebabkan pencampuran dengan sampah dan tumbuhan rerumputan. Serta banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan aspek pelestarian turut

mempercepat kerusakan pasir. Sebagai bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, Kraton Yogyakarta mengambil langkah pemeliharaan dengan mengganti pasir lama melalui proses pengerukan dan pengisian ulang secara bertahap. Proyek ini bertujuan mengembalikan keasrian serta menjaga nilai historis dan filosofis alun-alun.



[GAMBAR 5 | ALUN-ALUN SETELAH DIREVITALISASI MENGGUNAKAN PASIR]

[SUMBER : [HTTPS://YOGYAKARTA.KOMPAS.COM/IMAGE/2023/03/11/175619278/5-PERBEDAAN-ALUN-ALUN-LOR-DAN-ALUN-ALUN-KIDUL-YOGYAKARTA-ADA-TAPA-PEPE](https://yogyakarta.kompas.com/image/2023/03/11/175619278/5-PERBEDAAN-ALUN-ALUN-LOR-DAN-ALUN-ALUN-KIDUL-YOGYAKARTA-ADA-TAPA-PEPE)]



RUANG PUBLIK YOGYAKARTA : DI TENGAH KEPADATAN DAN KRISIS HIJAU

[OLEH : IRUEKKAWA ELISA¹]

KOTA Yogyakarta, dengan luas wilayah sekitar 32,82 km², merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 375.699 jiwa, menghasilkan kepadatan sekitar 11.546 jiwa/km². Kepadatan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan tata ruang dan penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penataan ruang wilayah, termasuk pengembangan kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan menyediakan minimal 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2023,

luas RTH publik di Kota Yogyakarta baru mencapai 220,45 hektar atau sekitar 6,64% dari total luas wilayah kota. Hal ini berarti terdapat kekurangan (backlog) RTH publik sebesar 435,04 hektar untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

[FOTO : RTHP GUNUNGKETUR, IRUEKKAWA ELISA]



1 Penulis Buku, Content Writer & Content Creator



FOTO : RTHP TAMAN PAKUDAYA, IRUEKKAWA ELISA

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan luas RTH, termasuk pembangunan taman-taman kota dan ruang terbuka di tingkat kampung. Hingga Desember 2023, tercatat terdapat 58 RTH publik berbasis kampung yang telah dibangun. Namun, peningkatan ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan RTH yang ideal.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan RTH, beberapa strategi telah diimplementasikan, antara lain:

1. Penanaman pohon di sepanjang jalan dan rel kereta api.
2. Pembebasan lahan untuk dijadikan area hijau di permukiman.

3. Pemanfaatan sempadan sungai sebagai RTH.

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan besar dalam penyediaan ruang terbuka hijau akibat tingginya kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan luas RTH, masih diperlukan strategi yang lebih efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Tantangan Tata Ruang Hijau Yogyakarta

Pada tahun 2017, Yogyakarta masuk dalam daftar enam kota paling hijau di Indonesia versi *World*

Economic Forum (WEF) yang bekerja sama dengan MIT Senseable City Lab. Penghargaan ini diberikan berdasarkan pemantauan satelit yang menganalisis cakupan ruang hijau di area perkotaan secara global. Dalam laporan yang dimuat oleh *Tempo.co* (13 Oktober 2017), kota-kota hijau tersebut dinilai dari proporsi vegetasi dan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah kepadatan urban.

Predikat ini seolah menjadi angin segar bagi Yogyakarta, kota budaya yang juga terkenal sebagai pusat pendidikan. Namun, di balik prestasi tersebut, tersimpan tantangan besar yang perlahan mencuat ke permukaan. Urbanisasi yang pesat, pertumbuhan ekonomi yang tak terbendung, dan

lonjakan pendatang yang terus meningkat, membuat kota ini harus berjibaku menjaga ekosistem ruang terbukanya.

Tata ruang kota ini menjadi elemen krusial dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini semakin penting di wilayah yang padat penduduk dan minim ketersediaan ruang hijau. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Yogyakarta adalah Malioboro dan sekitarnya—pusat ekonomi sekaligus ikon pariwisata kota.

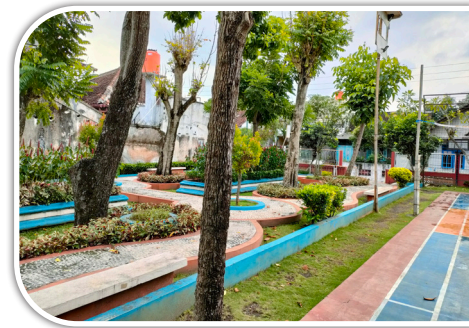
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta dalam *Kecamatan Dalam Angka 2023*, wilayah Gedongtengen—di mana Malioboro berada—memiliki kepadatan penduduk mencapai 11.458 jiwa per kilometer persegi. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan rata-rata Kota Yogyakarta yang berada di kisaran 9.779 jiwa per kilometer persegi. Padatnya kawasan ini diperparah oleh arus kunjungan wisatawan dan pedagang yang terus membanjiri Malioboro sebagai salah satu koridor ekonomi utama.

Di tengah padatnya aktivitas dan pertumbuhan infrastruktur, keberadaan ruang terbuka hijau justru mengalami tekanan hebat. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), idealnya sebuah kota menyediakan minimal 30 persen dari total luas wilayahnya untuk RTH (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Namun hingga tahun 2022, Kota Yogyakarta baru mampu menyediakan sekitar 19 persen ruang terbuka hijau dari total luas wilayahnya (KLHK.go.id, 2022).

Kondisi ini menyulitkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan pelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba menjawab tantangan tersebut melalui berbagai langkah strategis, seperti revitalisasi kawasan pedestrian Malioboro, penataan PKL, pembangunan taman kota seperti Taman Pintar dan Taman Surokarsan, serta pengembangan kebun vertikal di ruang sempit. Meski demikian, para pegiat lingkungan menilai bahwa upaya tersebut masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan tata ruang yang tumpang tindih dan minim keterlibatan komunitas lokal.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar penghijauan kosmetik, tapi restrukturisasi ruang secara inklusif, yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologis jangka panjang,” ujar Arif Nur Alam, Ketua Forum Komunikasi Ruang

Terbuka Hijau Yogyakarta, dalam wawancara dengan *Harian Jogja* (2023).



[FOTO : RTHP GUNUNGKETUR, IRUEKKAWA ELISA]

Dinamika RTH di Kawasan Padat Yogyakarta

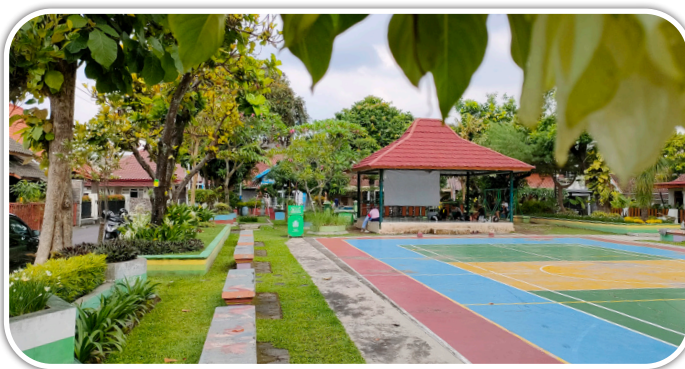
Beberapa kawasan di Kota Yogyakarta seperti Suryatmajan, bantaran Kali Code, Kampung Pajeksan, hingga Jogonegaran kini menjadi sorotan karena tingkat kepadatannya yang tinggi. Kawasan-kawasan tersebut padat penduduk, dan secara sosiologis memunculkan dinamika baru dalam penggunaan ruang. Dalam kondisi seperti ini, toleransi terhadap penggunaan ruang semakin tinggi, namun justru menurunkan tingkat privasi. Ruang yang awalnya bersifat publik atau komunal kini bergeser fungsi: gang sempit berubah menjadi tempat mencuci, menyimpan perabot rumah tangga, bahkan menjadi perluasan dapur. Akibatnya, ruang terasa sempit, penuh, dan kehilangan fungsinya sebagai ruang interaksi sosial.

Fenomena ini mempertegas bahwa kepadatan kota Yogyakarta tergolong tinggi. Menurut data BPS (2002), Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan



[FOTO : RTHP TAMAN BAKUNG, IRUEKKAWA ELISA]

[FOTO : RTHP TAMAN BAKING, IRUEKAWA ELISA]



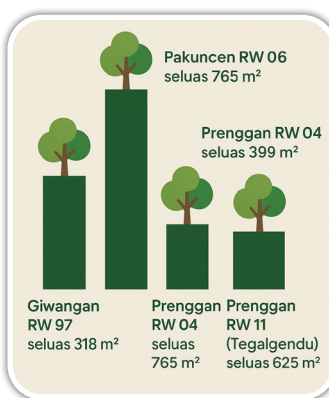
penduduk sebesar 12.080 jiwa/km², jauh melampaui Kabupaten Bantul maupun Sleman yang lebih longgar secara tata ruang (BPS, 2002).

Di tengah keterbatasan ruang di kawasan padat, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (revisi UU No. 24 Tahun 1992 dan tertulis dalam UU No. 7/2006 sebelumnya) menegaskan bahwa setiap kota wajib menyediakan minimal 30% dari total luas wilayahnya untuk RTH. Sayangnya, kota seperti Yogyakarta menghadapi tantangan besar. Banyak kawasan yang merupakan aset bersejarah dan kota tua tidak memungkinkan untuk diubah atau direlokasi demi pemenuhan standar RTH ini.

Namun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tinggal diam. Sebagai respons terhadap keterbatasan lahan dan kebutuhan akan ruang publik, Pemkot memodifikasi konsep RTH agar tidak semata-mata menjadi "paru-paru kota", tetapi juga ruang interaksi sosial. Seperti dilansir Tempo.co, RTH di Yogyakarta kini dilengkapi dengan fasilitas

seperti area bermain anak, sarana olahraga, hingga pos ronda, sehingga berfungsi ganda: ekologis dan sosiologis (Tempo.co, 2014).

Langkah konkret pun dilakukan. Pada tahun 2025, Pemkot Yogyakarta memanfaatkan aset milik pemerintah untuk membangun empat titik RTH baru, yaitu:



[FOTO : DATA RTH DI YOGYAKARTA, KUMPARAN.COM, 2025]

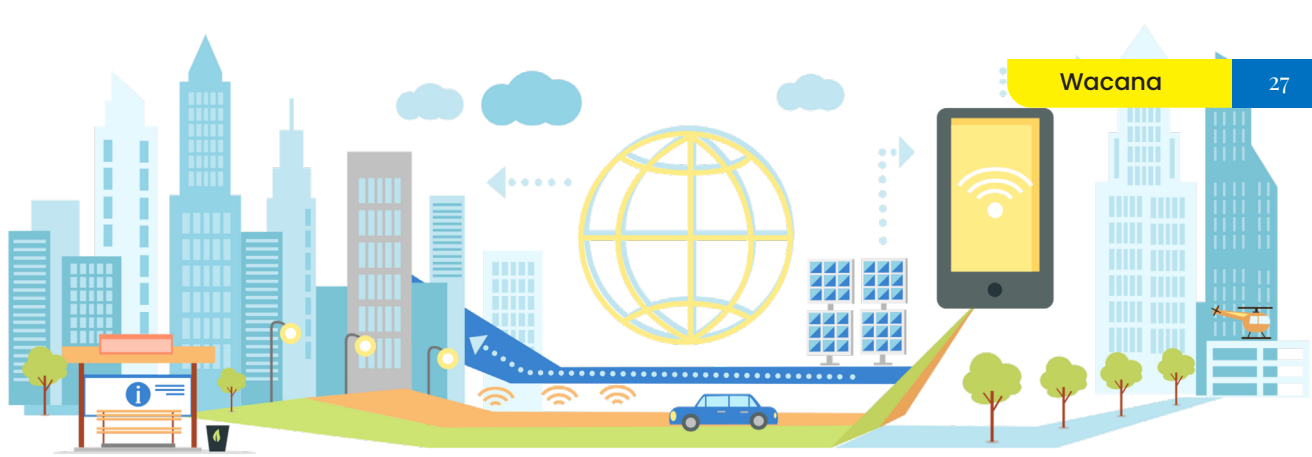
Bertahap namun konsisten, pembangunan RTH ini menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada tahun 2014 Yogyakarta tercatat memiliki 35 RTH di 14 kecamatan (Tempo.co, 2014), maka pada tahun 2024, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi 64 RTH publik berbasis kampung (Kumparan.com, 2024).

Ini menandakan bahwa meskipun kota ini padat dan penuh keterbatasan, inisiatif untuk membangun ruang terbuka tetap diupayakan dengan pendekatan adaptif dan berorientasi sosial.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan ruang di Yogyakarta memberikan pelajaran penting: bahwa RTH bukan hanya masalah estetika atau lingkungan, tetapi juga soal keadilan ruang dan hak warga atas ruang hidup yang layak. Di tengah kepadatan, ruang hijau menjadi lebih dari sekadar keharusan ekologis—ia adalah jembatan penting menuju kota yang sehat secara sosial.

Referensi:

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2002). *Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta*.
- BPS Kota Yogyakarta. (2023). *Kecamatan Gedongtengen Dalam Angka 2023*. <https://yogyakotakota.bps.go.id>
- Harian Jogja. (2023). *Pakar: Tata Ruang Yogyakarta Perlu Pendekatan Ekologis*. <https://www.harianjogja.com>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia*. <https://www.menlhk.go.id>
- Kumparan.com. (2024 & 2025). *Yogyakarta Tambah Titik RTH Berbasis Kampung*.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043*.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Tempo.co. (2014). *Pemkot Yogya Perluas Fungsi RTH untuk Sosialisasi Warga*.
- Tempo.co. (2017, 13 Oktober). *WEF: 6 Kota Ini Paling Hijau di Indonesia, Mana Saja?* <https://nasional.tempo.co>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/>



PEMBANGUNAN JALAN PRAMBANAN – GADING DALAM Mendukung KEMAJUAN INFRASTRUKTUR DAERAH

[OLEH : REDAKSI]

KABUPATEN Gunungkidul, sebagai salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata, sumber daya alam, hingga hasil laut. Potensi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum memadainya aksesibilitas dari arah Yogyakarta menuju Gunungkidul.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah DIY merencanakan pembangunan jalan Prambanan-Gading. Jalur ini akan menjadi penghubung penting antara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan, Kawasan

Gunung Api Purba, serta KSPN Karst Gunungkidul. Selain memperlancar konektivitas antar wilayah, terutama antara Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, pembangunan jalan

ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan yang dilalui.

Ruas jalan Prambanan-Gading sepanjang 27,68 kilometer tercantum dalam



[FOTO : DPUKESDM]



dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 sebagai salah satu prioritas pembangunan struktur ruang. Jalan utama ini dirancang untuk menghubungkan beberapa wilayah strategis, yaitu Prambanan, Patuk, Gedangsari, hingga Playen, guna memperkuat konektivitas dan mendukung pengembangan wilayah di DIY.

Jalan utama penghubung ke Kabupaten Gunungkidul (Yogyakarta - Piyungan - Gading - Wonosari) saat ini memiliki kondisi geometrik yang tidak memenuhi persyaratan dengan alinyemen vertikal >20% dan memiliki kondisi geologi yang berpotensi mudah longsor (khususnya ruas Piyungan - Patuk). Volume lalu lintas saat ini juga telah melebihi kapasitas jalan terutama pada hari Sabtu - Minggu dan hari libur lainnya (Derajat kejenuhan 0,76, pada tahun 2021 > 0,85). Hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemerintah untuk melakukan peningkatan



Menurut Bapak Kepala Bidang Bina Marga, Bapak Tri Murtoposidi, S.E., S.T.

“Urgensi dari pembangunan Jalan Prambanan – Gading sangat penting karena menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan akses jalan Yogyakarta menuju Gunungkidul. Adapun jalan akses lain melalui Cino Mati, kondisi geografis nya terlalu ekstrem. Salah satu kelebihan akses jalan Prambanan – Gading adalah melalui beberapa obyek wisata yang cukup menarik, selain itu akses jalan ini juga melewati kapanewon miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar jalan”.

kapasitas/pelebaran jalan, selain juga dikarenakan permukiman di sekitar jalan sudah cukup padat sehingga membutuhkan anggaran pembebasan tanah yang sangat besar.

Ruas jalan Prambanan – Gading nantinya akan bersinggungan langsung dengan exit jalan tol yang direncanakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan arahan Ngarsa Dalem, pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke depan akan difokuskan pada kawasan selatan. Salah satu bentuk nyata implementasi arahan tersebut adalah pembangunan Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS).

Saat ini, proses pembangunan JJLS hampir selesai, dengan hanya menyisakan dua proyek utama, yakni Jembatan Pandansimo dan Kelok Delapan Belas. Pembangunan Jembatan Pandansimo telah mencapai progres sekitar 70%, sementara pengerjaan Kelok Delapan Belas direncanakan akan dimulai pada Oktober 2025.

Bapak Tri Mustoposidi menegaskan, tantangan ke depan dalam bidang infrastruktur bukan hanya soal pembangunan, melainkan juga tentang pemeliharaan. Untuk itu, diperlukan upaya pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala guna menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan yang telah dibangun.



[FOTO : DPUPESDM]

Hingga tahun 2024, pembangunan Jalan Prambanan-Gading telah mencapai 18,8 kilometer atau sekitar 67,91% dari total panjang yang direncanakan. Progres ini dicapai melalui pembangunan bertahap di beberapa ruas jalan.

Ruas Gayamharjo-Tawang telah selesai dibangun pada tahun 2017, disusul oleh ruas Ngalang-Gading yang rampung pada tahun 2018. Selanjutnya, ruas Tawang-Ngalang dibangun pada periode 2021 hingga 2023. Sementara itu, ruas terakhir yaitu Prambanan-Gayamharjo sepanjang 9 kilometer masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Pembangunan Jalan Prambanan-Gading menjadi langkah strategis untuk membuka konektivitas baru antara Yogyakarta dan Gunungkidul. Dengan



[FOTO : DPUPESDM]

progres pembangunan yang terus berjalan, jalur ini diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek ini, termasuk perencanaan

pemeliharaan infrastruktur ke depan, menjadi kunci untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kawasan selatan.



TANAH PUSAKA, PEMBANGUNAN BERTUMBUH: PERAN KEISTIMEWAAN PERTANAHAN DALAM INFRASTRUKTUR DIY

[OLEH : ESTER RUFARIZA, S.T., M.A., M.URP.¹]

KEISTIMEWAAN DIY bukanlah hal baru yang ditemukan, kemudian dikemas ulang pada era modern. Merujuk pada Undang-Undang Keistimewaan DIY, bahwa keistimewaan DIY merupakan kedudukan hukum istimewa yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan asal-usul. Oleh karena itu, keistimewaan DIY merupakan entitas yang bersumber dari sistem dan tatanan kuno yang telah teruji selama beberapa abad, serta merupakan warisan turun-temurun yang sudah semestinya dilestarikan.

Dewasa ini, keistimewaan DIY dirumuskan dalam sebuah susunan yang lebih terstruktur, meliputi keistimewaan dalam urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan; kebudayaan; serta tata ruang dan pertanahan. Urusan pertanahan sendiri merupakan urusan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui berbagai kegiatan dalam

urusan pertanahan, seperti penatausahaan tanah kalurahan dan pemberian serat kekancingan, terlihat adanya irisan esensial antara kedudukan Sultan sebagai raja sekaligus Gubernur sebagai representasi dari pemerintah daerah.

Keistimewaan Urusan Pertanahan

Secara yuridis, pengembangan infrastruktur di DIY tidak bisa dilepaskan dari keistimewaan urusan pertanahan, karena tanah merupakan dasar dari semua pembangunan infrastruktur di atasnya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Agraria (Agrarisch Besluit) yang dimuat dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 118 Pasal 1, yang menegaskan bahwa “semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh orang lain bahwa di atasnya ada hak *eigendom* adalah milik (*domein*) dari negara”, maka wilayah DIY masih menjadi milik Kasultanan dan Kadipaten. Hal ini karena pemerintah Belanda tidak mempunyai tanah

dengan status *eigendom* di wilayah DIY. Lebih lanjut, hal ini diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di dalamnya terdapat poin penting, yaitu pengakuan negara Republik Indonesia terhadap Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan urusan pertanahan.

Istilah “tahta untuk rakyat” sangat tercermin dalam urusan pertanahan, di mana Kasultanan dan Kadipaten merelakan tanah yang secara sah adalah milik lembaga untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pembangunan DIY merupakan manifestasi dari keistimewaan DIY, khususnya dalam urusan pertanahan. Contoh konkret dari hal ini adalah pembangunan jalan tol di wilayah DIY yang rata-rata berada di atas tanah Kasultanan, Kadipaten, maupun tanah

1 Kasubdit Pengendalian Urusan Pertanahan Paniradya Keistimewaan

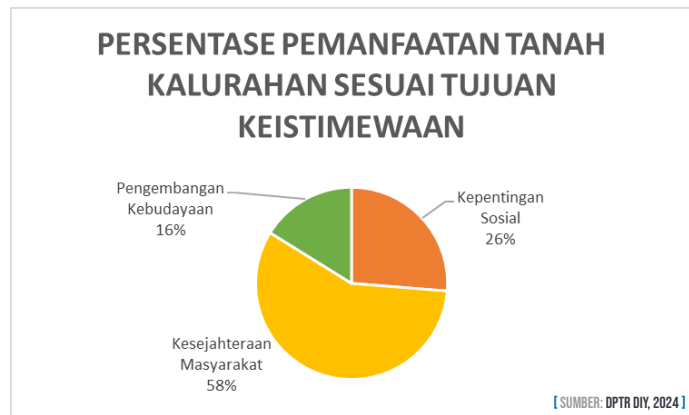
kalurahan. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), hingga kantor, dan bahkan rumah tinggal menggunakan tanah-tanah milik Kasultanan, Kadipaten, maupun tanah kalurahan.

Selain landasan yuridis sebagaimana disebutkan di atas, DIY memiliki landasan filosofis pembangunan yang masih lekat dirujuk sebagai tujuan besar pembangunan, yaitu *hamemayu hayuning bawana*, yang berarti “memperindah indahnya dunia.” Pada tingkat yang lebih praktikal, berbagai landasan filosofis lain juga menjadi semangat keyogyakartaan yang terus dilestarikan, seperti *nyawiji, greget*, dan *sengguh ora mingkuh*, yang sangat mewarnai pembangunan di DIY. Landasan filosofis dan yuridis inilah yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia dan menjadi bagian yang membuat DIY istimewa.

Pengembangan Infrastruktur dari Sudut Pandang Keistimewaan Urusan Pertanahan

1. Komposisi Luasan Tanah di DIY

Sampai saat ini, diketahui bahwa luas tanah Sultan Ground, Pakualaman Ground, dan tanah kalurahan yang sudah teridentifikasi adalah seluas 13.862.534 m². Dari keseluruhan tanah tersebut, diketahui bahwa komposisi tanah terluas adalah tanah kalurahan, yaitu seluas 9.007.454 m² atau 64,98% dari total luas yang sudah

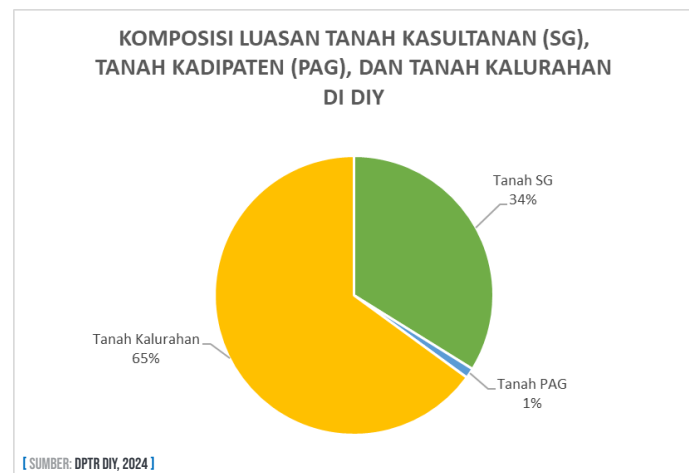


teridentifikasi. Sementara itu, tanah Sultan Ground (SG) hanya mencakup 33,85% atau seluas 4.693.112 m². Tanah Pakualaman Ground (PAG) merupakan komponen terkecil dibandingkan dengan yang lain, yaitu 1,17% atau seluas 161.968 m². Dari seluruh total tanah SG, PAG, dan tanah kalurahan di DIY yang telah diidentifikasi tersebut, sebesar 87,57% telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik umum maupun sosial.

2. Persentase Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Khusus tanah kalurahan, pemanfaatannya hingga

tahun 2024 ini mencapai 57% atau seluas 6.304.258 m² yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pasar desa, balai/ pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, puskesmas, pertokoan, gudang, dan lain-lain, dengan jumlah izin terbit sebanyak 493 izin. Sementara itu, sekitar 26% atau seluas 2.889.175 m² digunakan untuk kepentingan sosial, di antaranya JJLS, masjid, sarana olahraga, menara telekomunikasi, akses bandara, dan lain-lain, dengan jumlah izin terbit sebanyak 310 izin. Sekitar 1.795.121 m² atau 16% dimanfaatkan untuk



kepentingan pengembangan budaya, yang diantaranya digunakan untuk balai desa, kantor kecamatan, alun-alun kota, balai budaya, dan lain-lain, dengan jumlah izin terbit sebanyak 235 izin. Hingga saat ini, total izin yang telah dikeluarkan untuk berbagai kepentingan tersebut adalah sebanyak 1.038 izin. (Sumber: Data DPTR DIY, 2024).

Analisis sederhana pada kedua diagram tersebut di atas tentunya memberi gambaran faktual kondisi tanah di DIY beserta pemanfaatannya yang lebih komprehensif dan selama ini jarang terekspose secara utuh. Keluasan tanah kalurahan yang ternyata lebih dari dua pertiga total tanah di DIY dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, maupun kesejahteraan masyarakat adalah bukti nyata kontribusi urusan pertanahan bagi pengembangan infrastruktur di DIY.

3. Dukungan Urusan Pertanahan dalam Pembangunan Infrastruktur di DIY

Urusan pertanahan mendukung pembangunan infrastruktur di DIY melalui beberapa hal. Pertama, dengan memberikan kepastian alas hak melalui sertifikasi. Sertifikasi merupakan dasar dari semua pembangunan infrastruktur karena seyogianya pembangunan infrastruktur dilaksanakan di atas tanah yang statusnya sudah jelas. Kedua, dengan memberikan izin terhadap pembangunan

yang dilakukan di atasnya. Pemberian izin dilakukan melalui dua jalur, yaitu izin Gubernur untuk tanah kalurahan dan Serat Kekancingan untuk tanah Kasultanan dan Kadipaten. Selanjutnya, dengan memberikan dukungan pendanaan secara langsung maupun tidak langsung melalui dana keistimewaan. Dana keistimewaan ini utamanya dilaksanakan pada tingkat provinsi, namun dapat ditugaskan kepada kabupaten/kota maupun kalurahan melalui mekanisme BKK. Untuk BKK kalurahan, dana yang digelontorkan dapat langsung direalisasikan dan menyasar langsung pada optimalisasi tanah-tanah kalurahan dengan pembangunan yang inklusif, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelibatan kaum rentan, yakni masyarakat miskin, difabel, dan perempuan kepala keluarga.

4. Capaian Urusan Pertanahan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Jenis tanah	Jumlah sertifikat
Tanah SG/PAG	12.110
Tanah Kalurahan	11.550
Total	23.660

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2013 urusan pertanahan telah menerbitkan total 23.660 sertifikat yang terdiri atas 12.110 sertifikat tanah Kasultanan/Kadipaten, dan

11.550 tanah Kalurahan, sebagaimana tertera pada table berikut ini.

Jenis Ijin	Jumlah
Serat kekancingan	12.110
Ijin Gubernur	1.146
Total	13.256

Selain itu dilakukan pengawasan secara terus menerus dan berkala terhadap pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah Kasultanan/Kadipaten maupun Kalurahan demi memastikan pembangunan yang dilakukan diatasnya sesuai dengan izin yang telah diajukan, tertib administrasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Capaian pemberian izin sejak tahun 2013 hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Lebih lanjut capaian pembiayaan urusan pertanahan melalui dais dari tahun ketahun dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tahun	Anggaran (Rp)
2013	Rp 6.300.000.000
2014	Rp 23.000.000.000
2015	Rp 10.600.000.000
2016	Rp 14.284.960.000
2017	Rp 17.197.300.000
2018	Rp 23.040.388.000
2019	Rp 24.230.505.050
2020	Rp 19.784.545.187
2021	Rp 21.934.476.726
2022	Rp 27.023.359.881
2023	Rp 28.985.621.575
2024	Rp 35 899.763.890
Total	Rp 213.320.398.900
Rata-rata	Rp 17.776.699.908

5. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di DIY dari sudut pandang keistimewaan urusan Pertanahan

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di DIY dari sudut pandang keistimewaan urusan pertanahan adalah adanya sistem yang jelas, dukungan alat dan data yang memadai, sinergi antar lembaga, dan tidak kalah penting adalah adanya dukungan dana keistimewaan. Adanya sistem yang jelas dalam hal ini merujuk pada peraturan-peraturan yang telah dibentuk untuk mengorkestrasi pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah di DIY secara menyeluruh. Mulai dari Perdais Induk Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah

Kasultanan dan Kadipaten, serta Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Dukungan data yang lengkap dan valid dilakukan melalui pembangunan *command center* yang merupakan terobosan dari Pemda DIY untuk menampung data-data digital pertanahan serta mengkolaborasikannya dengan berbagai sektor terkait, menjadikannya sebuah *dashboard* yang mempermudah pengambilan keputusan strategis.

Selanjutnya adalah terjadinya harmoni sinergi antar lembaga dan lintas batas yang terpelihara dengan baik selama ini. Sinergi antara Pemerintah Daerah, Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, serta BPN terjalin melalui kerja sama yang selaras sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagai contoh, Kasultanan/Kadipaten sebagai pemilik tanah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin selalu melakukan pemeriksaan lapangan bersama Pemda DIY sebelum memberikan izin, sehingga terjadi sinkronisasi untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan secara tertib hukum, administrasi, berkelanjutan, dan berdayaguna.

Tak kalah penting adalah keberadaan dana keistimewaan yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan di DIY. Kesenjangan antara beban pembiayaan pembangunan

dan pemasukan DIY dalam sepuluh tahun terakhir semakin besar. Dana keistimewaan menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat meringankan beban pembangunan DIY, bahkan telah menjadi salah satu andalan dalam pembiayaan pembangunan, khususnya dalam kerangka urusan keistimewaan.

6. Harapan Kedepan dalam Upaya untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai dengan Budaya dan Kearifan Lokal di DIY

Ke depan, diharapkan terjadi perbaikan yang semakin baik di segala lini urusan pertanahan. Sistem yang dibangun semakin sempurna. Proses perencanaan pembangunan urusan pertanahan semakin visioner, rapi, terstruktur, dan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Koordinasi yang solid antar pihak yang terlibat dalam urusan pertanahan juga semakin terjalin dengan baik. Dana keistimewaan semakin dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang stabil di DIY. Ke depan, pembangunan di DIY diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada output, tetapi juga mampu memberikan nilai (*value*) yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa waktu ke depan, DIY dapat menjadi model pembangunan berbasis pertanahan istimewa di tingkat nasional.



MONITORING DAN EVALUASI

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan Kawasan Terpadu

20 25

[OLEH: REDAKSI]

PROGRAM Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan Kawasan Terpadu yang dibiayai melalui Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahun ketiga pelaksanaannya pada 2025. Inisiatif yang digulirkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini terus mendorong pengembangan potensi lokal di berbagai kalurahan.

Pada tahun pertama, program ini mengemuka lewat pengembangan Sanggar Among Lare di Kalurahan Sendangsari, Kulon Progo serta pembangunan Sport Center di Kalurahan Sumberagung, Bantul. Keberhasilan ini menjadi pemantik perluasan program pada tahun kedua, menjangkau lebih banyak kalurahan dengan berbagai inovasi.

Sejumlah proyek yang menonjol pada tahun kedua diantaranya pembangunan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Taman Srigading di Kalurahan Srigading, Bantul, serta RTH Taman Pandowo di Kalurahan Pandowoharjo, Sleman. Selain itu, Kalurahan Sambirejo, Sleman mengembangkan potensi wisata Watu Payung, Kalurahan Pagerharjo, Kulon Progo menginisiasi budidaya vanili, Kalurahan Giripurwo membangun RTH Taman Giripurwo, dan Kalurahan Pucung mengembangkan kawasan Dusun Wotawati.

Memasuki tahun ketiga, program ini memperluas cakupan dengan melibatkan 11 kalurahan. Sebanyak lima kalurahan merupakan penerima manfaat tahun sebelumnya, yaitu Sumberagung, Srigading, Sambirejo, Pagerharjo, dan Pucung. Sedangkan enam kalurahan baru yang bergabung adalah Lumbungrejo, Tirtomartani, Hargorejo, Banjaroyo, Jepitu, dan Giriasih.

Peningkatan jumlah penerima manfaat ini menunjukkan bahwa Program BKK Kalurahan Kawasan Terpadu tidak hanya memperkuat potensi lokal, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat pembangunan berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

• Kalurahan Sumberagung, Bantul

Kalurahan Sumberagung telah memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu. Pada dua tahun sebelumnya, Kalurahan Sumberagung mewujudkan pembangunan Komplek Olahraga Terpadu atau *Sport Center*. Pemerintah kalurahan Sumberagung telah menyelesaikan pembangunan Lapangan Voli, Lapangan Basket, dua Lapangan Tenis, Ruang Ganti Pemain Sertai Kamar Mandi. Pelaksanaan BKK pada

Kalurahan Sumberagung pada tahun 2025 akan fokus pada pembangunan

Gapura Pagar Pembatas *Sport Center*, Bangunan *Food Court*, serta Taman dan Drainase. Setelah pembangunan pada tahun ketiga ini, *Sport Center* Kalurahan Sumberagung diharapkan dapat mulai aktif, menjadi pusat kegiatan serta dapat menjadi stimulan perekonomian Kalurahan Sumberagung.



[LAPANGAN BASKET DALAM KAWASAN SPORT CENTER KALURAHAN SUMBERAGUNG]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Srigading, Bantul

Kalurahan Sumberagung telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu. Pada tahun sebelumnya, Kalurahan Srigading, Bantul sukses meningkatkan geliat ekonomi kalurahan melalui pembangunan RTH Publik Taman Srigading dengan beragam wadah aktivitas, seperti Lapangan Voli, Lapangan Basket, *Playground* anak - anak, *Jogging Track*, Dermaga Wisata Air Tepi Sungai serta Kios Kuliner. Melanjutkan keberhasilan tersebut pemerintah kalurahan pada tahun 2025 akan menambah area parkir serta bangunan limasan

untuk menjadi pusat kuliner yang menyediakan hidangan populer daerah Bantul, yaitu bakmi dilengkapi dengan Cafe. Pembangunan tahun kedua ini diharapkan akan mendorong potensi pariwisata wilayah selatan Bantul sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Srigading.



[AKTIVITAS EKONOMI PADA KIOS KULINER BERDAMPINGAN DENGAN JOGGING TRACK DAN LAPANGAN SEPAK BOLA]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Sambirejo, Sleman

Kalurahan Sambirejo, Sleman pada tahun 2025 akan melanjutkan pembangunan taman pada area wisata Watu Payung. Pada tahun 2024 pemerintah kalurahan telah membangun Area Kuliner, Kamar Mandi dan Tempat Duduk. Pada tahun 2025 pembangunan akan difokuskan pada *Landscape*, Gapura, Mushola dan *Deck* Multifungsi. Pembangunan pada destinasi wisata Watu Payung bertujuan untuk mengoptimalkan pariwisata di kawasan Tebing Breksi - Candi Ijo. Selain itu wisata Watu Payung berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Sambirejo sisi timur yang cenderung tertinggal dibandingkan dengan sisi barat maupun tengah.



[BANGUNAN KULINER DAN LANDSCAPE WISATA WATU PAYUNG KALURAHAN SAMBIREJO]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Lumbungrejo, Sleman

Kalurahan Lumbungrejo, Sleman memasuki tahun pertama pembangunan dalam kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu. Pemerintah kalurahan merencanakan untuk membangun sebuah Ruang Terbuka Hijau Publik yang terletak di barat Pasar Tempel. Pada tahun 2025 akan direncanakan pembangunan sarana prasarana bagi lapangan ditambah adanya *Jogging Track*, Perbaikan Jaringan Irigasi, Talud Penahan Lapangan dan Pagar Lapangan. Pembangunan Lapangan ini bertujuan sebagai sarana olahraga masyarakat Kalurahan Lumbungrejo serta kedepannya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.



[LAPANGAN KALURAHAN LUMBUNGREJO]
[FOTO : REDAKSI]



[LAPANGAN TAMAN RADEN RONGGO KALURAHAN TIRTMARTANI]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Tirtomartani, Sleman

Kalurahan Tirtomartani, Sleman yang berada pada sisi timur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah tapak Tanah Kas Desa yang berada pada lokasi strategis. Tapak TKD tersebut berdekatan dengan Candi Kalasan dan Candi Sari serta berada tepat pada Jalan Raya Solo - Yogyakarta. Selama ini area tersebut dimanfaatkan sebagai lapangan dan taman dengan nama Taman Raden Ronggo. Potensi tersebut pada tahun ini akan diolah melalui penyusunan *Masterplan* dan dokumen teknis *Detailed Engineering Design*. Visi pemerintah kalurahan kedepannya kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik serta *Rest Area* untuk menangkap potensi pariwisata maupun sebagai titik kumpul terdapat bagi exit TOL Kalasan.

• Kalurahan Banjaroyo, Kulon Progo

Kalurahan Banjaroyo, Kulon Progo sebagai salah satu kalurahan yang berada di Satuan Ruang Strategis

(SRS) Perbukitan Menoreh memiliki potensi pariwisata khususnya pada kawasan Kawasan Agrowisata Tonogoro Banjaroyo. Salah satu destinasi wisata pada kawasan tersebut, Amfiteater Tonogoro merupakan panggung pementasan serta pagelaran yang aktif mempersembahkan pagelaran seni serta budaya. Sebagai bentuk optimalisasi potensi pariwisata, seni dan budaya, pemerintah kalurahan pada tahun 2025 melalui BKK Kalurahan Kawasan Terpadu melaksanakan pengadaan Sarana Kesenian Modern dan Tradisional serta Pagelaran Pasar Tiban.



[VIEW PERBUKITAN MENOREH DARI AMFITEATER TONOGORO]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Pagerharjo, Kulon Progo

Kalurahan Pagerharjo, Kulon Progo pada tahun 2024 telah melaksanakan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu melalui pengembangan budidaya tanaman vanili yang merupakan tanaman khas SRS Perbukitan Menoreh. Setelah berhasil mengembangkan budidaya tanaman vanili pada Padukuhan Separang, Jobolawang dan Mbajing, pemerintah kalurahan akan mengembangkan *Green House* untuk pengembangan tanaman

vanili serta agrowisata, serta menambah penerima manfaat kedua padukuhan lainnya, yaitu Padukuhan Kemesu dan Ngentak. Selain itu, pemerintah kalurahan juga mengupayakan untuk meningkatkan produksi Kopi Menoreh melalui pembangunan Rumah Produksi Kopi.



[AREA TANAH KAS DESA YANG AKAN DIMANFAATKAN UNTUK PEMBANGUNAN GREEN HOUSE TANAMAN VANILI]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Hargorejo, Kulon Progo

Kalurahan Hargorejo, Kulon Progo merupakan salah satu kalurahan yang berada di SRS Perbukitan Menoreh, berlokasi di dekat Waduk Sermo. Pada tahun 2025 pemerintah kalurahan akan melaksanakan pembangunan kawasan *Integrated Farming* yang difungsikan untuk sektor pertanian komoditi tanaman buah, peternakan ayam hutan, domba dan budidaya ulat sutera Samia. Pembangunan ini diharapkan akan meningkatkan skala perekonomian petani di Kalurahan Hargorejo. Selain itu lokasi kawasan juga memiliki daya tarik pariwisata disebabkan oleh kondisi fisik geografis yang berbentuk lereng.



[VIEW KAWASAN INTEGRATED FARMING KALURAHAN HARGOREJO]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Pucung, Gunungkidul

Kalurahan Pucung, Gunungkidul pada tahun 2024 berhasil meningkatkan daya tarik Dusun Wotawati yang berada di lembah sungai Bengawan Solo Purba. Peningkatan fasad hunian serta pembangunan pagar lingkungan menggunakan bata ekspos, berarsitektur kolosal mataram. Daya tarik dusun Wotawati berhasil memikat wisatawan lokal maupun luar DIY, sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2025 pemerintah kalurahan merencanakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan,



[FOTO UDARA DUSUN WOTAWATI KALURAHAN PUCUNG]
[FOTO : REDAKSI]

yaitu Peningkatan Fasad Masjid, Pembangunan Gapura, *Tourist Information Center*, Toilet, Gazebo, Penerangan Jalan, Saluran Drainase, Perkerasan Jalan, Fasad 34 Rumah dan Pagar Pendopo serta Kawasan.

• Kalurahan Giriasih, Gunungkidul

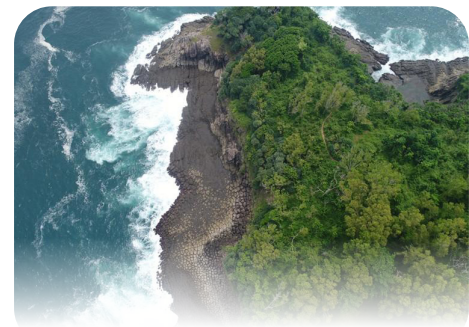
Kalurahan Giriasih, Gunungkidul sebagai salah satu kalurahan di SRS Karst Gunungsewu memiliki potensi wisata Embung Bembem yang merupakan tanah *Sultan Ground*. Embung yang dibangun pada tahun 2020 ini memiliki banyak manfaat untuk Masyarakat antara lain sebagai konservasi, irigasi perkebunan, sebagai air baku, mengatasi kekeringan saat musim kemarau hingga perikanan. Dengan adanya sisa lahan di sekitar embung, pemerintah kalurahan berupaya untuk mengolahnya menjadi ruang terbuka hijau publik. Melalui BKK Kalurahan Kawasan Terpadu tahun 2025, pemerintah kalurahan akan membangun Taman Lalu Lintas, Pagar Kawasan, Lampu Antik dan Gazebo. Melalui pembangunan sarana prasarana tersebut, diharapkan akan meningkatkan potensi wisata di Embung Bembem.



[FOTO UDARA DUSUN WOTAWATI KALURAHAN PUCUNG]
[FOTO : REDAKSI]

• Kalurahan Jepitu, Gunungkidul

Kalurahan Jepitu, Gunungkidul merupakan salah satu kalurahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul yang terkenal dengan beragam potensi pariwisata pantainya. Salah satu potensi pariwisata pantainya yang cukup unik di Kalurahan Jepitu adalah Gunung Manjung yang memiliki pantai Botorubuh. Perbukitan yang berada di tepi pantai, dengan gugusan batu unik yang memecah ombak bagaikan sisik ular, lokasinya di dekat Pantai Jungwok.



[FOTO UDARA TEBING BUKIT GUNUNG MANJUNG / PANTAI WATURUBUH KALURAHAN JEPITU]
[FOTO : REDAKSI]

Destinasi Gunung Manjung menjadi alternatif bagi peminat wisata alam dan peminat hiking. Pemerintah kalurahan dalam menangkap potensi tersebut melalui BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di tahun 2025 akan menyusun Master Plan serta dokumen teknis *Detail Engineering Design* (DED) sebagai upaya mengembangkan destinasi wisata Gunung Manjung.

PETA RASA JOGSEL (JOGJA SELATAN) :

MENELUSURI KULINER DI SRS KERTO-PLERET DAN SEKITARNYA

[OLEH : REDAKSI]

SRS Kerto-Pleret yang lokasinya ada di wilayah Bantul tidak hanya menjadi tempat bersejarah dan religi yang menarik untuk dikunjungi, melainkan juga menjadi pintu gerbang menuju beragam destinasi kuliner yang patut untuk dijelajahi. Di kawasan ini, para wisatawan dan pengunjung bisa menikmati kelezatan khas lokal, mulai dari warung makan tradisional hingga yang kekinian. *Ambience* pedesaan yang tenang dan masih dikelilingi oleh pemandangan hijau membuat kuliner di kawasan SRS ini sayang untuk dilewatkan.

1. Sate Klathak

Sate khas dari Bantul ini diberi nama “klathak” berasal dari suara daging yang meletup berbunyi *klathak-klathak* ketika proses pembakaran, atau dari kata “nglethak” yang berarti menggigit. Bahan dasar yang digunakan adalah daging kambing yang masih muda. Sate klathak menjadi salah satu kuliner khas Bantul yang banyak dikunjungi wisatawan karena keunikannya, yaitu



[FOTO : REDAKSI]

daging sate disajikan dengan menggunakan besi jeruji (sepeda) bukan seperti sate pada umumnya yang menggunakan tusuk dari batang bambu. Alasan menggunakan jeruji sepeda yaitu karena sifatnya yang tidak mudah patah saat digunakan untuk menusuk maupun membakar sate. Besi sebagai penghantar panas yang baik dipercaya dapat membuat daging sate matang secara lebih merata sehingga teksturnya empuk dan *juicy*. Satu lagi yang membuat berbeda adalah sate ini hanya dibumbui dengan bawang, garam, ketumbar dan merica yang nantinya disajikan bersama dengan kuah gulai, bukan bumbu kacang. Bersama kesederhanaannya, terdapat

cita rasa dan kelezatan tersendiri. Perpaduan antara gurih dan asin dari sate klathak itu sendiri, daging kambing yang tidak alot dan tidak amis serta kombinasi kuah gulai yang *light* sangat cocok dipadukan dengan nasi hangat.

Hampir di setiap warung sate klathak juga menyediakan sate biasa yang di bumbui dengan kecap dan disajikan dalam bentuk daging yang sudah di lepas dari tusukannya, kemudian dikombinasikan dengan irisan kol, tomat, dan cabai. Selain sate klathak, terdapat pilihan menu lain seperti tengkleng, gulai, tongseng, gorengan, dan lainnya.

Berbagai rumah makan sate klathak, mulai dari yang legendaris hingga yang



- Datang lebih awal! tempat populer cenderung cepat penuh.
- Hindari datang saat perut kosong.
- Siapkan uang tunai karena sebagian tempat belum menerima pembayaran digital.
- Jangan ragu untuk minta tingkat kematangan sesuai selera!
-

2. Mie Ayam Pak Sarmintul Pleret

A top-down view of a wooden plate containing two bowls of spaghetti. The bowl in the foreground is white and filled with spaghetti, meat sauce, and fresh green vegetables. The bowl in the background is wooden and also contains spaghetti with meat sauce and vegetables. The entire dish is presented on a rustic wooden surface.

Sate Pak Pong buka setiap hari mulai pukul 09.00-23.30 WIB. Selain sate dan tengkleng, menu yang menarik untuk dicoba adalah tongseng kepala kambing. Semua makanan disini dijamin empuk dan lezat. Kalau berkunjung ke Jogja, wajib untuk mencoba kuliner kambing ini.

Tempat ini buka sejak pukul 11.00 WIB dan sering ramai dikunjungi para pecinta kuliner. Jadi, pastikan datang lebih awal agar tidak kehabisan.

Warung makan satu ini tidak hanya memuaskan rasa lapar dan dahaga Anda, tetapi juga memanjakan mata dengan pemandangan bukit dan sawah yang terhampar sejauh mata memandang. Terletak di tengah lahan



pertanian, warung ini bisa menjadi opsi andalan bagi Anda yang ingin berkuliner sambil berwisata. Buka dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB, waktu operasionalnya memberi keleluasaan bagi Anda untuk memilih menikmati suasana pagi atau sore hari yang syahdu.

Tidak hanya mengandalkan *view cantik*, "Bale Mindo Soto dan Kopi" juga terlihat cukup serius dalam menyusun menu. Sesuai namanya, menu utama yang ditawarkan adalah soto dan kopi. Sotonya sendiri merupakan jenis soto sapi yang disajikan dalam mangkuk yang terbuat dari batok kelapa. Pilihan kopinya cukup beragam—mulai dari yang autentik, seperti kopi tubruk, hingga varian modern, seperti caramel dan hazelnut. Selain itu, tersedia pula makanan berat lainnya, seperti bakso, ayam, lele, nasi goreng, bakmi, hingga seblak. Menu pelengkap pun tak kalah lengkap, ada sate-satean, baceman, gorengan, serta berbagai jenis kerupuk dan keripik. Untuk minuman, pilihannya aman untuk semua generasi—dari wedang seruni hingga es *green tea*.



[FOTO : REDAKSI]

Dengan banyaknya bangku yang tersedia, baik kursi maupun lesehan, warung ini cocok untuk dikunjungi bersama keluarga atau rombongan. Tak heran jika sering menjadi destinasi favorit para pesepeda yang mencari sarapan segar setelah berolahraga. Jadi, bagaimana? Sudah berniat mengajak keluarga ke sini untuk bersantap sambil menikmati senja? Jangan lupa bawa kamera, soalnya pemandangan senja bakal cantik banget!

4. Pojok Indah Resto

Warung Makan Pojok Indah Resto telah menjadi andalan warga Kalurahan Pleret dan sekitarnya untuk makan bersama dengan keluarga ataupun teman. Menu andalan warung makan ini adalah gurame bakar dan iga bakar. Yang membuatnya lebih spesial lagi selain bumbu bakarnya adalah gurame yang digunakan masih dalam keadaan hidup dan baru diolah saat pembeli mememesannya—menambah rasa segar dan nikmat. Selain itu, tersedia juga berbagai menu lain, seperti olahan

ayam, bebek, lele, cumi-cumi, udang, kerang, aneka sayuran, dan minuman.

Selain rasa makanan yang enak, tempat yang nyaman dan luas, harga yang terjangkau di Pondok Indah Resto turut menjadi alasan warung ini selalu ramai, dengan Rp23.000,00 saja pengunjung sudah dapat menikmati paket nasi beserta gurame asam manis. Warung ini berlokasi di Jalan Pleret KM. 1, Kepuh Wetan, Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

5. Sate Kuda Segoro Roso 2

Selain dikenal sebagai pusat kuliner sate kambing, Pleret juga punya sajian unik yang tak boleh dilewatkan: sate kuda. Salah satu warung yang terkenal dengan sate kudanya ialah 'Segoro Roso 2' yang terletak di Bedakan,



[FOTO : REDAKSI]

Pleret, Kapanewon Pleret, Bantul. Berlokasi di dekat jalan raya dan memiliki area parkir yang luas. Tempat ini mudah diakses dan tidak menyulitkan pengunjung dalam hal parkir. Berbagai macam olahan daging kuda dapat dicicipi, mulai dari sate, tongseng, empal, hingga otak kuda. Namun, sate kuda tetap menjadi menu yang paling diminati pelanggan. Satu porsi sate kuda yang terdiri atas nasi dan empat tusuk sate dibanderol dengan harga Rp30.000, tongseng Rp32.000, empal Rp15.000 per potongnya, dan otak goreng seharga Rp32.000. Sate kuda di bumbu dengan kecap dan bisa dimakan dengan nasi atau lontong. Bagi pengunjung yang tidak suka daging kuda tetap bisa menikmati kuliner di warung ini karena disediakan pilihan lain seperti daging ayam dan sapi.

Tempat ini cukup banyak dikunjungi oleh penikmat kuliner untuk mendapatkan pengalaman kuliner yang baru dan menarik. Daging kuda memiliki tekstur yang lebih berserat, tetapi warung ini mampu mengolahnya sehingga sate tidak terlalu alot. Selain rasanya yang nikmat, sate kuda juga rendah kolesterol. Nikmati sensasi lezat dari sate ini karena di sini anda akan mendapatkan sate kuda yang enak dan dibumbui dengan rempah pilihan.

6. Lesehan Kriuk Pecel Lele & Sambel Belut Mbak Sita

Lesehan Kriuk Pecel Lele & Sambel Belut Mbak Sita menawarkan bermacam sajian makanan yang sangat menggugah selera. Tempat makan ini menawarkan menu sambel welut, lele kremes, ayam kremes, tempe, dan tahu. Semua makanan disini diberikan



[FOTO : REDAKSI]

pilihan untuk digoreng atau dibakar, dan disajikan bersamaan dengan sambal bawang yang pastinya akan menambah selera makan. Penyajian makanan yang unik menggunakan tampah mini menambah daya tarik tersendiri bagi warung makan ini. Lesehan Kriuk Pecel Lele & Sambel Belut Mbak Sita berlokasi di Jalan Bedukan Kidul, Bedakan, Pleret dan buka mulai pukul 15.00 - 00.00 WIB.

7. Soto Lenthok Pak Gareng

Soto telah menjadi bagian yang spesial bagi masyarakat Jogja. Jenis makanan satu ini tidak pernah salah untuk dinikmati kapan saja—mulai dari sarapan, makan siang, hingga malam hari. Salah satu warung soto yang bisa dijajal di daerah Pleret adalah “Soto Lenthok Pak Gareng”. Warung yang berlokasi di Pleret ini merupakan satu dari tiga cabang yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua lainnya berada di Kota Yogyakarta.



[FOTO : REDAKSI]



[FOTO : REDAKSI]



Soto lenthok pada dasarnya adalah soto ayam dengan tambahan lenthok—mirip perkedel, tetapi terbuat dari singkong, bukan kentang. Kuahnya bening, dengan isi soun, suwiran ayam, potongan tomat, dan kol. Ciri khas utama dari warung ini tentu terletak pada lenthoknya. Namun, bagi Anda yang kurang suka, tersedia juga pilihan lauk lainnya, seperti sate usus dan tempe goreng sebagai pelengkap semangkuk soto hangat.

Meskipun buka sedikit lebih siang dibanding dua cabang lainnya—yakni pukul 08.00 pagi—soto lenthok ini tetap jadi pilihan pas untuk sarapan atau makan siang saat Anda berada di sekitar Kalurahan Pleret. Dengan harga terjangkau dan rasa yang enak, semangkuk soto ini bisa jadi awal yang pas untuk mengeksplorasi Kawasan SRS Pleret.

8. Omah Pleret Culinary & Cafe

Salah satu *spot* sarapan di daerah Pleret yang bisa menjadi pilihan yang menarik. Tempat ini tidak sekedar menjadi lokasi untuk

mengisi perut, tetapi juga menghadirkan suasana khas penuh nuansa pedesaan. Di sini, wisatawan disuguhkan beragam pilihan menu khas desa yang menggugah selera. Salah satu menu andalan yang banyak digemari adalah bubur krecek, hidangan yang memadukan kelembutan bubur dengan rasa gurih dan pedas dari krecek. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai jenis sayur khas “ndeso” yang diolah dengan resep tradisional, aneka gorengan hangat, serta masih banyak pilihan lainnya. Dengan harga yang terjangkau sekitar Rp.25.000,00 per orang cocok untuk Anda yang

ingin melarikan diri sejenak dari hiruk pikuk kota dan menikmati ketenangan pagi.

9. Kopi Komplit Nusantara

Seorang *coffee snob**? Atau tim *procaffeinating**? Kedai ini bisa jadi surga kecil bagi Anda yang bosan dengan kopi langganan atau sedang ingin ngopi hemat tanpa mengorbankan rasa. Klaimnya, ada 75 varian biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia yang tersedia di sini—mulai dari arabika, robusta, hingga *blend*.

Kopi dalam bentuk biji maupun bubuk cocok dijadikan oleh-oleh yang praktis dan mudah disimpan. Ragam rasa dan jenisnya pun sangat bervariasi sehingga bisa disesuaikan dengan selera tiap individu. Anda juga bisa meminta rekomendasi langsung dari barista/brewer Kopi Komplit Nusantara untuk menemukan biji kopi yang pas, lengkap dengan cita rasa dan aroma yang Anda cari.

Kedai ini juga melayani jasa penggilingan dan *roasting* biji kopi. Bahkan, Anda bisa mencicipinya terlebih dahulu lewat layanan *brewing* mereka—

[FOTO : REDAKSI]



[FOTO : REDAKSI]



jadi bisa dipastikan kopi yang Anda bawa pulang benar-benar sesuai selera.

**coffee snob* istilah untuk menyebut pecinta kopi yang sangat menyukai kopi, bahkan sampai rela mengolahnya sendiri

**procaffeinating* istilah bagi Anda yang tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan merasa hampa jika belum minum kopi

10. Omah Jejer

Kalau kalian lagi cari tempat makan yang adem, asri, tenang dan enak, coba melipir ke Omah Jejer. Lokasinya ada di Jalan Imogiri Timur, Pleret, Bantul.

Hidangan andalan disini adalah ayam ingkung khas Jawa. Buat yang belum tahu, ayam ingkung adalah ayam kampung utuh yang dimasak dengan bumbu rempah khas yang rasanya manis dan gurih. Porsinya? tenang aja, satu ingkung bisa untuk rame-rame. Cocok banget untuk makan bareng keluarga atau acara bareng temen-temen. Disajikan lengkap dengan nasi gurih, urap, sambal, dan juga dapet teh poci hangat loh. Dari segi harga, Omah Jejer masih termasuk ramah kantong dan porsinya besar serta rasa yang autentik, rumah makan ini *worth it* untuk dicoba.

11. Gerbang Pleret

Gerbang Pleret merupakan bangunan yang berarsitektur gaya klasik Yogyakarta, yang terinspirasi dari masa kejayaan Kerajaan

Mataram Islam. Di sinilah Anda bisa mulai mengenal “Kerto-Pleret”, cikal bakal dari Kota Yogyakarta yang kita kenal sekarang. Lokasinya mudah dicari, ada di sebelah barat Balai Kalurahan Pleret, tepatnya di sisi selatan ruas jalan Jejeran-Pleret. Tapi tunggu dulu, tempat ini bukan hanya untuk wisata sejarah maupun foto-foto.

Gerbang Pleret juga menjadi tempat kuliner dan hiburan lokal. Ada beberapa stand makanan dan minuman yang siap memanjakan lidah kamu. Tempat ini juga memiliki panggung hiburan yang biasanya akan diisi dengan live musik, pentas seni, dan pertunjukan lainnya. Fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap. Ada toilet, mushola, taman untuk duduk bersantai, dan bahkan spot informasi destinasi wisata se-Kalurahan Pleret.

[FOTO : REDAKSI]



[FOTO : REDAKSI]



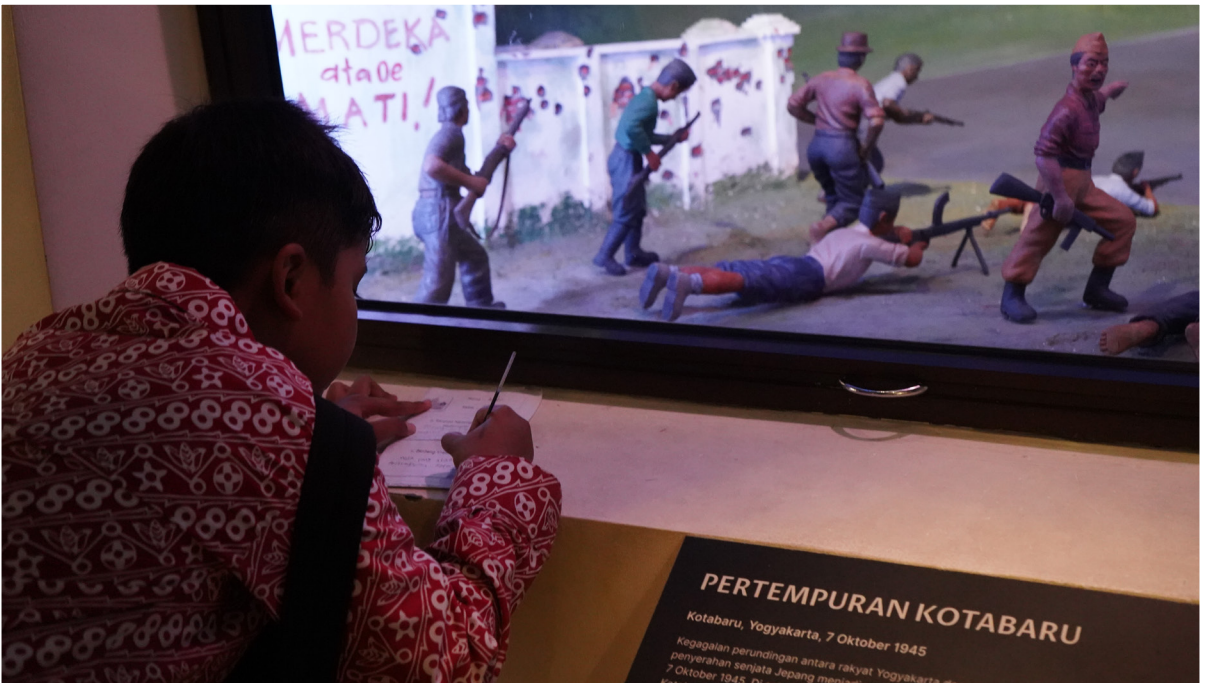


FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY

BENTENG VREDEBURG

BENTENG Vredeburg dibangun pada tahun 1767 - 1867. Bangunan lama sempat hancur karena gempa di tahun 1867, kemudian dibangun kembali. Bangunan ini merekam berbagai peristiwa sejarah. Seperti di tahun 1811-1816 Benteng Vredeburg dikuasai oleh Inggris. Di tahun 1942 bangunan dikuasai oleh Tentara Jepang yang berhasil menduduki Yogyakarta. Tahun 1948 Belanda kembali menguasai Benteng Vredeburg, kemudian bangunan tersebut digunakan menyimpan alat tempur sekaligus sebagai markas Dinas Rahasia Belanda. Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 TNI berhasil menguasai Benteng Vredeburg. Kini, bangunan bersejarah dijadikan sebagai Museum dan menyimpan lebih dari 7.000 benda bersejarah. Area luar bangunan inti Benteng Vredeburg kini disediakan ruang terbuka hijau yang menyenangkan .







PASAR SENTUL YOGYAKARTA : SIMFONI BARU DALAM WAJAH LAMA

DI JANTUNG kawasan Pakualaman, Yogyakarta, berdiri megah Pasar Sentul dengan wajah barunya. Diresmikan pada 27 Februari 2024 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, pasar ini kini menjadi simbol transformasi pasar tradisional ke era modern, tanpa kehilangan denyut budaya lokal. Pasar yang dulunya sesak dan kusam kini menjelma menjadi bangunan tiga lantai berarsitektur Indisch, memadukan nuansa kolonial dan lokal yang memikat.

Keunikan pasar ini mempertahankan identitas lama, sebagai pusat distribusi jagung mentah. Tak hanya menjadi tempat jual beli, Pasar Sentul dilengkapi dengan fasilitas seperti eskalator, area parkir luas, ruang pengelola, ATM, tempat ibadah, kamar mandi, hingga layanan kesehatan. Pasar Sentul bukan sekadar tempat berbelanja. Ia adalah wajah baru kota yang merawat akar lama.



[FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY]





FOTO : TIM PUBLIKASI DPTR DIY

JALUR ALTERNATIF PENUH PESONA: JEMBATAN TAWANG NGALANG DI KEDUNG KANDANG

DESA Nglanggeran, Patuk Gunung Kidul kini ada spot baru bernama Jembatan Tawang Ngalang. Jembatan Tawang ngalang adalah jalur alternatif Yogyakarta-Klaten. Lokasinya persis di kompleks Taman Wisata Kedung Kandang. Tempat ini menawarkan pesona pemandangan alam lanskap alami berupa sawah terasering yang mengelilingi tebing batuan vulkanik purba yang instagramable. Keunikan tempat ini mampu mengkombinasikan keindahan geologi, budaya pertanian lokal, dan spot trekking ringan. Tempat ini tidak hanya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat sekitar, tetapi juga dimanfaatkan untuk healing, fotografi alam, dan edukasi geowisata.



PEMBANGUNAN TAMAN

Sebagai Solusi Polusi Udara di Yogyakarta Akibat Proyek Jalan Tol Jogja-YIA

[OLEH : ALFINA MIFTA NAFISAH]

SMA NEGERI 1 NGEPLAK

PULAU Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di Indonesia. Pada dasarnya perkembangan wilayah semakin kedepan akan berubah. Dinamika pembangunan yang terjadi secara pesat dan cepat menuntut pemerintah untuk

membuat tindakan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi serta dampaknya. Yogyakarta sebagai salah satu kota besar yang berada di Pulau Jawa, tidak luput dari perkembangan tersebut. Perkembangan wilayah pasti akan mempengaruhi tata ruang wilayah tersebut. Perkembangan wilayah akan diikuti oleh peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi, serta fasilitas pendukungnya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi dampak dari perkembangan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan seharusnya memperhatikan penataan ruang, karena menjadi arahan dan batasan dalam kegiatan

pembangunan. Pemanfaatan ruang seharusnya dilaksanakan dengan pengelolaan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, ketersediaan, dan kegunaan sumber daya alam serta daya dukung lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsinya. Tata ruang merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai strategi dalam mengembangkan prasarana wilayah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan jaringan jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



¹ [PEMENANG LOMBA ARTIKEL KEISTIMAWAAN TATA RUANG DIY TINGKAT SMA TAHUN 2022]

Pembangunan jalan Tol Jogja-YIA merupakan salah satu pengembangan jaringan jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jalan tol tersebut merupakan keberlanjutan dari pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport). Perkembangan tersebut tentunya akan mengubah struktur tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Penataan ruang di wilayah Yogyakarta merupakan salah satu dari sistem proses perencanaan dan penataan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan kawasan satuan strategis tersebut.

Yogyakarta merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi,

sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya tempat wisata juga membutuhkan akses untuk menuju wilayah Yogyakarta. Salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah akses menuju Yogyakarta adalah dengan membangun Bandara YIA. Bandara YIA merupakan bandara Internasional yang membuat bandara tersebut selalu ramai. Untuk mempersingkat waktu perjalanan masyarakat dan memperlancar lalu lintas menuju bandara YIA, maka pemerintah membangun jalan tol Jogja-YIA. Meskipun pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas, tetapi ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kualitas udara di Yogyakarta.

Jalan tol tersebut menghubungkan Provinsi Jawa Tengah (Kota Solo) dengan Provinsi Yogyakarta yang membentang sepanjang 96,57 kilometer,

yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 42,38 kilometer, sedangkan yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 54,19 kilometer. Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA memperhatikan kearifan lokal, bangunan bersejarah, serta tetap melestarikan situs-situs cagar budaya dan purbakala yang ada, sehingga akses menuju destinasi wisata semakin mudah.

Pembangunan jalan tol ini melewati beberapa daerah di Yogyakarta diantaranya yaitu: Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Ada 6 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang terdampak proyek Tol Jogja-YIA yaitu: Sentolo, Nanggulan, Pengasih, Wates, Temon, dan Kokap. Di Kabupaten Sleman yang terdampak meliputi Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, dan Kecamatan Moyudan. Sedangkan wilayah Kabupaten Bantul yang terdampak meliputi Desa Argomulyo, dan Desa Argosari di Kecamatan Sedayu.

Rencana Pembangunan Tol sedikit menjauh dari Gapura Sambungra Lahan yang Terdampak Area Persawahan, Jalan-jalan kecil, dan Permukiman

Pembangunan jalan tol ini akan mengganggu tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dengan adanya proyek ini maka jumlah ruang terbuka hijau yang ada di wilayah



[FOTO: IRUEKKAWA ELISA]

Yogyakarta mengalami penurunan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang tumbuh karena ditanam. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah wilayah atau kota.

Salah Satu Contoh Ruang Terbuka Hijau di Kompleks Benteng Vredenburg

Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi ruang terbuka hijau kota minimal 30% dari luas wilayah kota tersebut. Luas ruang terbuka hijau wilayah Yogyakarta saat ini sekitar 23%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada pembangunan ruang terbuka hijau. Saat ini pemerintah terus mengejar penambahan ruang terbuka hijau publik agar dapat mencapai angka minimal ruang terbuka hijau minimal

transportasi yang lebih cepat dan efisien. Salah satu proyek yang sedang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan jalan tol menuju Bandara YIA. Bandara YIA merupakan pintu gerbang udara bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan pembangunan jalan tol Jogja-YIA, waktu tempuh dari pusat kota menuju bandara menjadi lebih singkat, sehingga dapat meningkatkan daya



[FOTO: IRUEKAWA ELISA]

Mengapa ruang terbuka hijau disebut sebagai paru-paru kota? hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

suatu kota yaitu sebanyak 30% dari luas wilayah kota.

Di tengah upaya pemerintah Yogyakarta untuk membangun ruang terbuka hijau, pemerintah juga membangun Bandara YIA dan juga proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja-YIA. Meningkatnya mobilitas dan pertumbuhan yang pesat di Yogyakarta mengakibatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana

tarik dan kenyamanan para pengguna sarana dan prasarana transportasi.

Pembangunan jalan Tol Jogja-YIA memang berguna untuk mempermudah akses menuju bandara dan mempunyai banyak manfaat, tetapi banyak juga dampak buruk yang ditimbulkan. Aktivitas pembangunan jalan tol akan memerlukan banyak lahan, sehingga ada aktivitas penebangan pohon dan

perubahan aliran air yang merusak lingkungan sekitar. Membuka lahan baru dengan cara menebang pohon dapat mengurangi jumlah area hijau yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah karbondioksida. Padahal fungsi dari area hijau tersebut untuk menyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen.

Selama tahap konstruksi jalan tol, akan ada banyak debu dan partikel-partikel kecil yang terangkat ke udara sehingga dapat menyebabkan polusi udara lokal. Debu dan partikel-partikel kecil itu berasal dari material yang digunakan untuk membangun jalan tol. Terkadang terdapat beberapa material seperti tanah, dan pasir yang terjatuh di jalan pada saat pengangkutan menyebabkan polusi bagi warga sekitar karena ikut terbawa angin. Polusi tersebut dapat menyebabkan gangguan pada mata dan gangguan pernapasan.

Dengan dibangunnya jalan Tol Jogja-YIA akan meningkatkan mobilitas kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Pada saat jalan Tol Jogja-YIA mulai beroperasi maka semakin banyak kendaraan yang melintas di jalan tol. Semakin banyak kendaraan yang melintas di jalan Tol Jogja-YIA maka akan semakin banyak juga jumlah polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Banyaknya kendaraan

yang melintas dapat menyebabkan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan yang melintas.

Gas-gas buang tersebut seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan hidrokarbon yang merupakan gas hasil pembakaran bahan bakar kendaraan yang dapat menyebabkan polusi udara dan berkontribusi dalam pemanasan global. Polusi udara tersebut akan sulit berkurang karena jumlah pohon yang berfungsi untuk menyerap karbondioksida berkurang akibat pembukaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka kondisi udara di Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin memburuk dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan biasa hingga gangguan pernapasan yang lebih parah.

Polusi udara di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dikurangi dengan cara membangun ruang terbuka hijau, dengan adanya ruang terbuka hijau yang cukup

maka udara di wilayah tersebut akan cukup untuk masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan jalan tol Jogja-YIA terhadap kualitas udara di Yogyakarta. Pemerintah sebaiknya melakukan program penghijauan dan penanaman kembali vegetasi yang tepat untuk mengimbangi dampak penebangan pohon selama konstruksi jalan tol.

Penghijauan dan penanaman kembali vegetasi bisa dilakukan di sekitar wilayah yang terdampak untuk pembuatan jalan tol. Penanaman dan penghijauan tersebut bisa dilakukan



dengan membuat taman kota di setiap kabupaten yang terdampak. Taman kota juga dapat dibuat untuk memenuhi proporsi minimal ruang terbuka hijau di kota tersebut.

Di wilayah Kulon Progo, dapat dibuat taman di daerah Kecamatan Temon, karena wilayah Kecamatan Temon dekat dengan lokasi bandara berada sehingga taman itu nantinya dapat dijadikan tempat wisata yang baru. Selain itu taman tersebut juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Selain pembuatan taman pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas umum dari Bandara YIA menuju tempat-tempat wisata yang ada di

wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam menyusun kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat agar implementasi proyek jalan tol dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Selain itu upaya menjaga kebersihan dan kualitas udara yang lebih baik untuk masa depan Yogyakarta yang lebih cerah. Jadi selain tanggung jawab pemerintah, pengupayaan pembangunan ruang terbuka hijau juga merupakan tanggung jawab masyarakat yang tinggal di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pembangunan jalan Tol Jogja-YIA merupakan proyek infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah Yogyakarta. Pembangunan jalan tol juga merupakan pemanfaatan kawasan

satuan strategis untuk mengembangkan jaringan jalan.

Tetapi perlu diakui bahwa proyek ini juga memiliki dampak negatif pada kualitas udara di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Emisi gas dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan, dapat menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Polusi debu dan partikel-partikel kecil, berkurangnya lahan terbuka hijau di wilayah Yogyakarta serta kerusakan lingkungan juga merupakan dampak negatif dari proyek pembangunan jalan Tol Jogja-YIA.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan langkah-langkah yang efektif, salah satunya dengan penanaman dan penghijauan kembali vegetasi melalui pembangunan taman di sekitar jalur tol sebagai bentuk dari ruang terbuka hijau di wilayah Yogyakarta. Dalam menyusun kebijakan infrastruktur, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan proyek jalan tol akan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan jalan tol dapat dinikmati bersama dengan upaya menjaga kebersihan dan kualitas udara yang lebih baik untuk masa depan Yogyakarta yang cerah.





Nilai-Nilai Warisan Budaya

Dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

[OLEH : RIZKY ADI SUDRAJAD, S.PWK., MURBNCULHER]



“Saya memang berpendidikan Barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa,”

Sri Sultan Hamengku
Buwono IX

PESAN yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sewaktu naik tahta di hadapan Gubernur Jenderal Adam pada tahun 1940 silam ini menjadi sangat relevan untuk tetap menjaga unsur-unsur atau lokalitas nilai yang harus diindahkan dalam membangun atau mengembangkan suatu infrastruktur (John Monfries, 2015, p. 80). Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan suatu keniscayaan yang sah dan merupakan suatu bagian integral dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendayagunaan kearifan lokal, yaitu Kasultanan dan Pakualaman

dalam pengaturan keistimewaan menjadi wujud peran budaya dan warisan budaya bangsa dan dunia yang secara kontemporer masih relevan (Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, p. 8). Kearifan lokal yang adiluhung ini menjadi aset yang berharga sebagai bentuk manifestasi lanskap budaya (Amin, 2012, p. 1). Kebudayaan menjadi arus utama pembangunan, kebudayaan DIY yang adiluhung harapannya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat DIY. Pendekatan kebudayaan dalam pembangunan selaras dengan nilai *hamemayu hayuning bawana*, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan nilai dalam pembangunan ini menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi suatu pondasi keistimewaan Yogyakarta yang bersifat permanen (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, pp. 8–10). Pengindahan unsur budaya menjadi penting untuk menjaga pondasi keistimewaan

DIY agar selaras dengan nilai-nilai keistimewaan.

Perkembangan kawasan perkotaan yang cepat dan tidak terkendali dapat mengancam sumber daya budaya, ditambah dengan pembangunan infrastruktur pendukung perkotaan dapat berdampak negatif apabila dalam proses perencanaan dan implementasinya tidak mengadopsi nilai-nilai budaya. World Bank menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang merekognisi nilai-nilai warisan budaya lokal merupakan gerbang menuju investasi infrastruktur yang tepat. Investasi pengembangan infrastruktur berbasis warisan budaya merupakan elemen kunci dalam membentuk suatu kawasan yang layak huni dengan peningkatan penghidupan penghuni dan kesempatan untuk peningkatan ekonomi, serta menumbuhkan pariwisata berkelanjutan. Salah satu inisiasi World Bank dalam integrasi nilai warisan budaya dengan pengembangan infrastruktur ialah *Bosnia-Herzegovina Pilot Cultural Heritage Project* melalui



[FOTO 1 JEMBATAN MOSTAR, BOSNIA DAN HERZEGOVINA]
[SUMBER: UNESCO]

rekonstruksi Jembatan Mostar (figure 1) yang secara signifikan mampu merevitalisasi inti kota, merekonsiliasi penduduk, dan menumbuhkan industri pariwisata lokal (Ebbe, 2009, pp. 1-3). Pengembangan infrastruktur dengan mengindahkan nilai-nilai lokal dapat meningkatkan nilai atau kualitas kawasan perkotaan. Namun demikian, kasus di lapangan dapat berbeda karena nilai-nilai yang dianut pada suatu wilayah berbeda antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang nilai-nilai warisan budayanya dapat dipancarkan melalui budaya benda atau monument, negara-negara di Asia menekankan nilai-nilai budaya tak benda dan pemaknaan suatu warisan budaya melalui aktivitas-aktivitas harian mereka (Daly et al., 2012, p. 140).

Ken Taylor (2004; dalam Daly et al. 2012), menyatakan bahwa negara Asia memiliki nilai-nilai spiritual yang lebih kuat dari nilai-nilai material

pada suatu warisan budaya. Sebagai contoh nilai-nilai fengshui dan geomansi pada nilai budaya China dan Korea menentukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan wilayah perkotaan (Figure 2) (Daly et al., 2012, p. 43).

Hal tersebut juga terpancar dalam lanskap budaya Jawa. Di Jawa, masyarakat tradisional

memiliki pandangan bahwa alam dan saujana di Jawa merupakan campuran antara kepercayaan, ritual, dan mitos. Melalui hubungan ini, dua unsur dominan dalam strata sosial masyarakat Jawa yaitu priyayi dan *wong cilik* bertemu (Amin, 2012, p. 1). Konsep ini dapat diartikan sebagai *Manunggaling Kawula lan Gusti*, konsep kosmologis tersebut tercermin pada tata letak Keraton Yogyakarta yang menggabungkan dua unsur penting saujana dengan unsur gunung dan air. Gunung Merapi dan Pantai Selatan menjadi dua unsur penting dalam hubungan antara saujana alam dan tata lingkungan kosmologis yang membentuk tata ruang Yogyakarta (Surjono et al., 2023, p. 9). Keraton Yogyakarta dibangun selaras pada sumbu utara-selatan, sumbu imajiner, sebelah utara sejajar dengan Gunung Merapi dan pada



This old map shows the landscape of Seoul, which used to be called Hanyang for 500 years during the Joseon Dynasty.

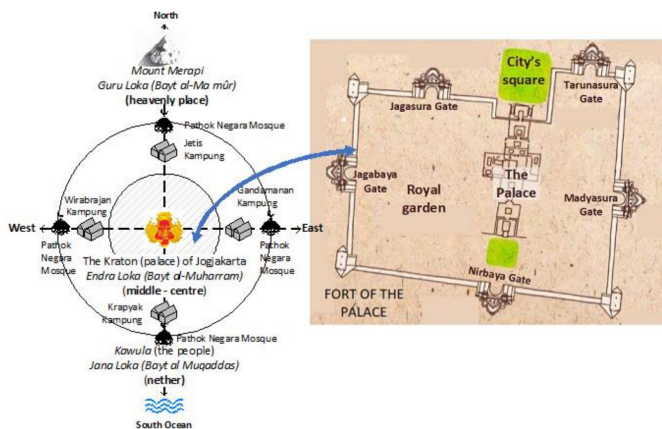
[FOTO 2 PENDEKATAN GEOMANSI DALAM PERENCANAAN HANYANG (KEMUDIAN SEOUL)]
[SUMBER: OPENENDEDSOCIALSTUDIES.ORG]

garis imajiner selatan selaras dengan laut Selatan (Amin, 2012, pp. 6-7). Melalui prinsip kosmologis tersebut, terbentuklah tata kota inti Yogyakarta dengan filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang terwujud dalam sumbu filosofi yang tersusun atas Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak. Manifestasi dari Sangkan Paraning Dumadi kemudian diturunkan kepada unsur yang lebih luas seperti, arsitektur bangunan, tata vegetasi, tata nilai budaya, dan tata pemerintahan. Manifestasi dan interpretasi saujana pusaka tersebut ada karena hubungan antara Keraton dan masyarakat secara langsung (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, p. 149).

diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan harmoni, kelestarian lingkungan, sosial-ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*), asas spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*), *manunggaling kawula lan gusti*, asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner), ketaatan historis (sumbu filosofi), asas filosofi inti kota (catur gatra Tunggal), dan asas delineasi (*pathok negara*) (Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, p. 35). Konteks adopsi nilai-nilai keistimewaan pada pengembangan ruang-ruang Istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh

dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten. Sebagai contoh SRS Sumbu Filosofi, ditujukan sebagai ruang yang mampu merepresentasikan filosofi budaya DIY. Tujuan ini dapat dicapai dengan kebijakan pembangunan yaitu pengembangan karakter yang mewakili filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Catur Gatra Tunggal* dan penguatan fungsi yang sesuai dengan filosofi DIY. Kebijakan ini dilaksanakan dengan, memperkuat karakter kawasan melalui pengembangan elemen pelengkap kawasan yang merepresentasikan nilai filosofi yang ada dan pengembangan fungsi ruang publik yang memancarkan nilai *Catur Gatra Tunggal*.

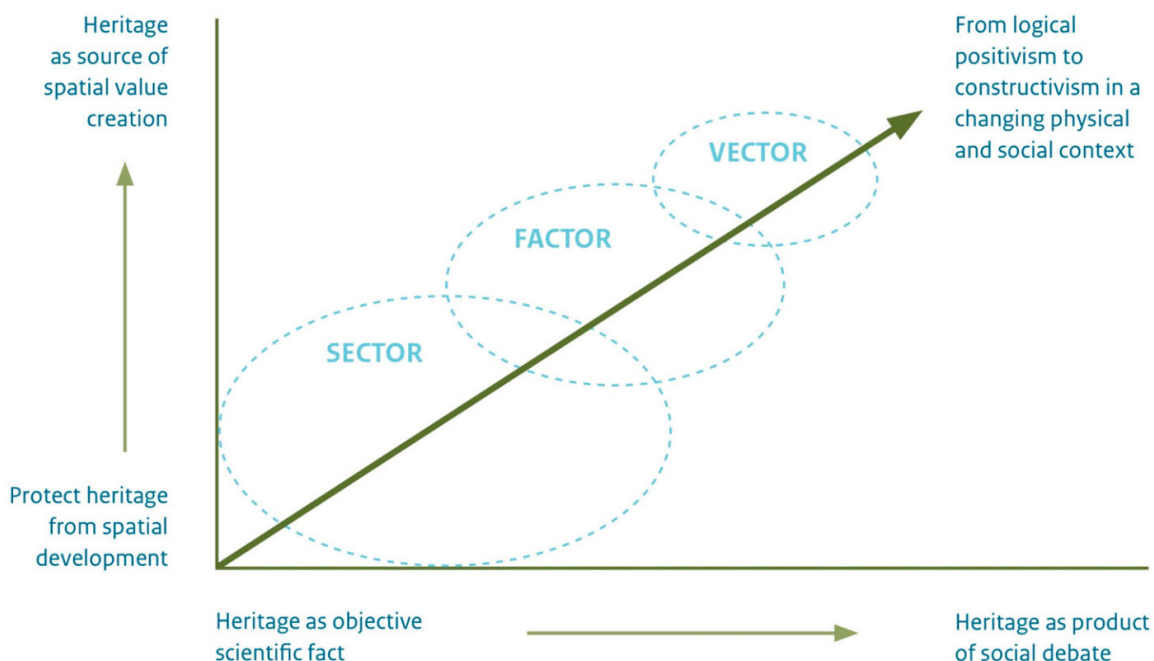
Integrasi nilai-nilai warisan budaya lokal ke dalam perencanaan wilayah di DIY sejalan dengan konsep *heritage as a vector* yang juga menjadi paradigma baru perencanaan pembangunan wilayah di dunia, khususnya Belanda. Unsur warisan budaya dalam konteks perencanaan ruang berkembang dari yang sebelumnya fokus pada preservasi objek, kemudian zonasi lanskap warisan budaya pada perencanaan ruang komprehensif, dan sekarang memasukkan unsur-unsur nilai lokal dalam proses perencanaan, sosial, dan ekonomi. Pengembangan wilayah khususnya infrastruktur yang tidak terkendali dapat menghilangkan nilai-nilai dan makna suatu kawasan atau bangunan. Lingkungan terbangun dan alam dalam lanskap warisan budaya



[FOTO 3 TATA LETAK KOSMOLOGIS KRATON YOGYAKARTA]
[SUMBER: SURJONO, 2023]

Nilai-nilai budaya dalam lanskap tersebut menjadi nilai utama dalam pengembangan Tata Ruang Keistimewaan DIY. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017, penataan ruang keistimewaan DIY

karena itu translasi nilai-nilai ini tertuang secara utuh dalam tujuan, kebijakan, strategi hingga indikasi program pemanfaatan ruang pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan



[FOTO 4 PERUBAHAN PARADIGMA WARISAN BUDAYA DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN WILAYAH]
[SUMBER: JANSSEN ET AL. (2017)]

memiliki arti dan nilai yang penting. Hal inilah yang mendasari *heritage as a vector* berkembang. Selain itu dengan diperkenalkannya konsep warisan budaya tak benda, implementasi *heritage as a vector* semakin kuat. Pengetahuan akan nilai, pemaknaan, dan peristiwa bersejarah dapat menjadi pemandu dalam pengembangan wilayah dalam dimensi fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu berdasarkan konsep *heritage as a vector*, nilai-nilai warisan budaya lokal merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk penciptaan suatu tempat dalam konteks penataan ruang (Figure 4).

Melalui konsep ini terdapat beberapa tantangan dan kesempatan dalam pengembangan wilayah. Tantang terbesar ialah bagaimana mengkontekstualkan

nilai-nilai warisan budaya dalam suatu mekanisme yang empiris. Hal tersebut dikarenakan perspektif nilai-nilai warisan budaya dapat berbeda dari satu individu ke individu lain. Kemudian bagaimana menginterpretasikan apabila terdapat konflik antara nilai warisan budaya yang sifatnya tak benda dengan kebutuhan pengembangan fisik seperti infrastruktur. Di sisi lain, konsep ini dapat meningkatkan perencanaan pembangunan khususnya infrastruktur untuk lebih inklusif dengan mengindahkan peran komunitas dan partisipasi publik dalam perencanaan, implementasi, dan pembangaunan infrastruktur dalam konteks pengembangan wilayah (Janssen et al., 2017). *Heritage as a vector*, mampu digunakan sebagai panduan dan alternatif dalam

pengembangan wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal, sehingga fokus pengembangan wilayah dan infrastruktur tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi tetapi juga nilai-nilai budaya lokal yang unik dan esensial (Janssen et al., 2017, pp. 12-14).

Contoh implementasi *heritage as a vector* ialah pembatalan mega proyek jalan raya *East-West Link* di Melbourne, Australia. *East-West Link* merupakan jalan raya yang direncanakan pada tahun 2009, jalan ini diharapkan mampu mengurangi beban jaringan transportasi di kota Melbourne. Namun demikian, masyarakat menolak proyek ini karena berpotensi akan berdampak negatif pada *Royal Park* yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau public tertua di Melbourne. *East-West*

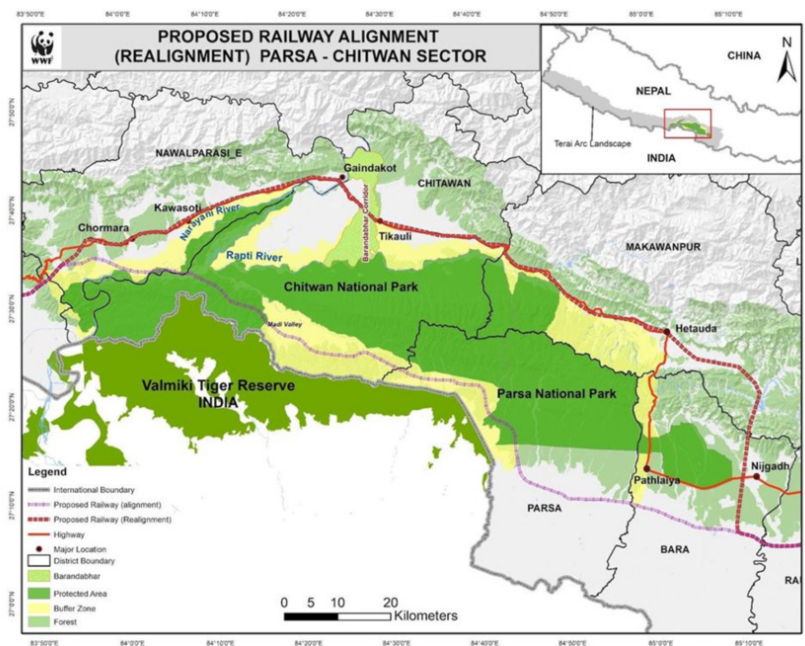
Link dapat mendegradasi Royal Park baik secara fungsi maupun luasan karena akan mengurangi ruang terbuka dan menyebabkan segmen Royal Park menjadi terbagi (Figure 5). Melalui keputusan dewan perwakilan rakyat/ *council of Melbourne*, maka proyek *East-West Link* dibatalkan. Justru dewan menganjurkan penguatan Kembali Royal Park melalui desain rencana induk terbaru untuk menguatkan nilai-nilai ruang terbuka tersebut (City of Melbourne, 2013).

Contoh kedua ialah pembangunan rel kereta api yang melintasi Taman Nasional Chitwan, Nepal. Taman Nasional Chitwan merupakan warisan budaya dunia dan merupakan rumah bagi harimau Bengal dan badak bercula satu. Dikarenakan pembangunan rel yang melintas memotong taman nasional dapat mengganggu upaya konservasi, maka pada tahun 2017 Pemerintah

Nepal merubah rencana rel kereta api yang mengitari batas taman nasional (Figure 6) (IUCN World Heritage Outlook, 2020).

Di Yogyakarta, beberapa contoh pembangunan

infrastruktur juga mengindahkan nilai-nilai penting. Seperti pada pembangunan Yogyakarta International Airport, YIA. Pola pertanian batik Surjan dilindungi agar tidak terjadi



[FOTO 6 PERUBAHAN RUTE REL KERETA API YANG MELINTASI TAMAN NASIONAL CHITWAN, NEPAL]
[SUMBER: NEWS.MONGABAY.COM]



[FOTO 5 PERENCANAAN EAST-WEST LINK YANG MENGANGKAT ROYAL PARK]
[SUMBER: HERALDSUN.COM.AU]

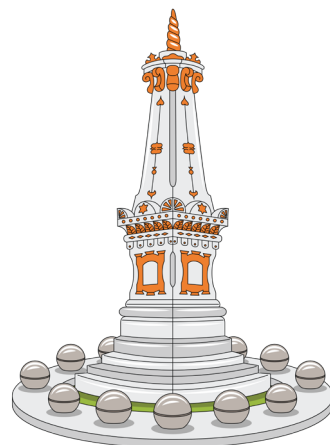
alih fungsi lahan karena efek adanya YIA dan dilindungi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2023-2043. Kemudian, keberadaan Masjid Pathok Ngoro Mlangi sebagai bagian integral dari keistimewaan DIY mengharuskan trase Tol Cilacap-Yogyakarta untuk diubah, agar unsur keistimewaan Pathok Nagara tidak menurun (Miftahul Huda, 2020). Pengembangan infrastruktur terkini, yaitu kajian rencana pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) Tugu dan Lempuyangan, Sri Sultan Hamengku Buwono X meningkatkan pentingnya mengindahkan dan mengutamakan nilai-nilai budaya Yogyakarta (PT Techne Praxis, 2024). Pengarusutamaan nilai-nilai budaya dengan pembangunan di Yogyakarta sudah berjalan dan dikuatkan menjadi produk legal dengan ditetapkannya RTRW DIY 2023-2043 dan SPW SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten 2023-2043.

Paradigma kontemporer tentang pembangunan wilayah dan infrastruktur saat ini sudah integral dengan nilai-nilai warisan budaya, dengan adanya konsep *heritage as a vector*. Di Yogyakarta nilai-nilai keistimewaan menjadi arus utama dalam pembangunan fisik maupun non fisik, dan sudah diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang. Adanya nilai warisan budaya sebagai instrumen pemandu pengembangan wilayah untuk menjaga nilai-nilai budaya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh

Laura Jane Smith bahwa warisan budaya itu tidak ditemukan tetapi dibuat, dan yang menentukannya adalah bagaimana kita menggunakannya saat ini sebagai bagian dari proses budaya (Labadi & Long, 2010, p. 31).

Referensi:

- Amin, J. J. A. (2012). *Cultural landscapes of Java*. Taylor & Francis Group.
- Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://birotapem.jogjaprov.go.id/b/22-Buku-Sejarah-Pemerintahan-DIY-jogja>
- City of Melbourne. (2013, November). *City of Melbourne Submission to East West Link Assessment Committee*. City of Melbourne.
- Daly, P., Winter, T., Fong, K. L., Winter, T., Rii, H. U., Khanjanusthiti, P., Tandon, A., Peleggi, M., Ray, H. P., Barnard, T. P., Cody, J. W., Fong, K. L., Logan, W., Ai, J., Lloyd, G., Brauchler, B., Denes, A., Dove, M. R., Long, C., ... Daly, P. (2012). *Routledge Handbook of Heritage in Asia* (P. Daly & T. Winter, Eds.). Routledge.
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Yogyakarta City of Philosophy*. https://www.jogjaworldheritage.com/_files/ugd/4d2058_e033c505719e4b35b53ecce5ce7e42eb.pdf
- Ebbe, K. (2009). Infrastructure and Heritage Conservation: Opportunities for Urban Revitalization and Economic Development. *The World Bank, Directions in Urban Development*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/214781468339680465/pdf/480190BRIOREPL1irections0301PUBLIC1.pdf>
- IUCN World Heritage Outlook. (2020). *Chitwan National Park: 2020 Conservation Outlook Assessment*. IUCN World Heritage Outlook. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://worldheritageoutlook.iucn.org/node/1011/pdf%3Fyear%3D2020&ved=2ahUKEwjMmrTs1eCMAxUoT2wGHQBGMoQFnoECCMQAQ&usq=AOvVaw2oMha-wPjK8mQhTxGkclAn>
- Janssen, J., Luiten, E., Renes, H., & Stegmeijer, E. (2017). Heritage as sector, factor and vector: Conceptualizing the shifting relationship between heritage management and spatial planning. *European Planning Studies*, 25(9), 1654-1672. <https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1329410>
- John Monfries. (2015). *A Prince in a Republic*. Institute of South East Asian Studies.
- Labadi, S., & Long, C. (Eds.). (2010). *Heritage and Globalisation* (1st ed., Vol. 1). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Miftahul Huda. (2020, Desember). *Redesain Tol Yogyakarta-Cilacap, Trase Jalan Tol Digeser Agar Tak Ganggu Masjid Pathok Ngoro*. Tribun Jogja. <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/23/redesain-tol-yogyakarta-cilacap-trase-jalan-tol-digeser-agar-tak-ganggu-masjid-pathok-negoro>
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/68792>
- PT Techne Praxis. (2024). *Yogyakarta Strategic Partnership*. Yogyakarta Strategic Partnership. <https://technepaxis.com/projects/yogyakarta-strategic-partnership>
- Surjono, S., Antariksa, & Titisari, E. Y. (2023). Indonesian Javanese Cosmology and its Transformation in Social Tradition and Built Environment. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6782-6798. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13931>



Hallo Pembaca PERTARU!

Tidak terasa sudah memasuki tahun 2025. Apakah Anda salah satu yang suka membaca? Membaca menjadi jembatan untuk mencapai banyak jalan kesuksesan. Ada banyak media baca yang dapat dijadikan sebagai sarana. Bisa membaca secara cetak maupun online. Buletin PERTARU salah satu rekomendasi teman baca yang mengantarkan Anda mengetahui informasi terkini.

Buletin PERTARU yang diolah oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Dispertaru DIY) sebagai salah satu media menyebarluaskan informasi, pemikiran dan wawasan tentang penataan ruang dan pertanahan. Buat Anda yang mencari referensi, menambah pengetahuan tentang tata ruang Buletin PERTARU adalah jawabannya.

Yuk Baca!

Selalu Ada Hal Yang Menarik Tiap Edisinya Loh!

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL PERTARU

Redaksi Buletin PERTARU menerima tulisan berupa foto, topik utama, sekilas info, wacana, potret ruang, pojok dan jurnal. Format penulisan bisa menggunakan acuan sebagai berikut.

1. Ditulis menggunakan Bahasa Indonesia
2. Ditulis menggunakan MS Word, huruf Times New Roman, ukuran 12 point, spasi 1,5. Tulisan diutamakan memperbanyak infografis/peta/grafik/skema/ atau ilustrasi full color.
3. Panjang tulisan minimal 3 halaman (800 kata) maksimal 6 halaman (1.600 kata)
4. Tulisan berbentuk fakta, dikemas padat dan jelas
5. Foto/karikatur/peta/grafik/skema di format JPG
6. Artikel belum pernah dipublikasikan di tempat lain Setiap tulisan yang dikirimkan ke redaksi wajib disertakan nama lengkap, nomor HP, gelar/jabatan, foto penulis dan scan kartu identitas (KTP/SIM)
7. Kirimkan data diri KTP/SIM melalui nomor Whatsap Dispertaru DIY dengan format "Nama penulis - judul tulisan/foto" ke nomor WA +6282138740340

Tema PERTARU Edisi 3: Ruang yang Tertata, Pangan yang Terjaga

Tulisan dan Foto dikirim maksimal 20 Juli 2025

KETENTUAN PENGIRIMAN FOTO DI RUBRIK POTRET RUANG

Buat Anda yang memiliki hobi fotografi, bisa mengirimkan karya fotografi ke Redaksi Buletin PERTARU. Syarat dan ketentuan.

1. Kirim foto Terbaik Anda terkait dengan tata ruang/budaya/keindahan alam dan sosial
2. Foto hasil karya sendiri, bukan plagiat foto orang lain dan bukan foto AI
3. Syarat pengiriman foto wajib menuliskan judul foto, dan lokasi foto
4. Foto perlu diberi deskripsi bercerita singkat sesuai foto
5. Tema foto tentang penataan ruang
6. Foto karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan
7. Tidak mengandung sara dan pornografi
8. Foto diambil di wilayah DIY, rentang waktu paling lama 1 tahun terakhir (Resolusi Foto Minimal 300 MB)

Hasil Tulisan dan hasil fotografi diserahkan dalam bentuk soft copy, dan dikirimkan ke dispertaru@jogjaprovo.go.id

Alamat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.4, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55231
(0274) 588219 + fax ; (0274) 2924586
www.dispertaru.jogjaprovo.go.id
twitter: @dispertarudiy
instagram : @dispertaru.diy

Catatan : Redaksi berhak merubah judul dan mengedit tulisan tanpa mengubah substansi/isi tulisan.



မိမိကလေးဟာကလေးတွေ နားထောင်ဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးဟာကလေးဟာကလေး

